



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

CLARITY IN TRANSITION

HADAPI TRANSISI, KINERJA TERUJI

LAPORAN KINERJA

KANWIL DJKN JAWA
TENGAH DAN D.I.

YOGYAKARTA

2025



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
C. Mandat dan Peran Strategis	12
D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan	15
E. Sistematika Laporan	16
RENCANA KINERJA	
A. Rencana Strategis	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
C. Pengukuran Kinerja	21
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	22
AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Kinerja Anggaran.....	39
C. Kinerja Lain-lain	39
D. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	40
PENUTUP	
A. Penutup.....	42
LAMPIRAN	49

Daftar Tabel

TABEL A.1 RINCIAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	3
TABEL 1.1 KOMPOSISI PEGAWAI KESELURUHAN, BERDASARKAN GOLONGAN, DAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	10
TABEL 1.2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL	11
TABEL 1.3 RINCIAN RUMAH DINAS	11
TABEL 1.4 RINCIAN KENDARAAN DINAS.....	11
TABEL 2.1 RINCIAN <i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>	20
TABEL 2.2 RINCIAN <i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>	20
TABEL 2.3 RINCIAN <i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>	21
TABEL 2.4 RINCIAN <i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i>	21
TABEL 3.1. RINCIAN INDEKS INTEGRITAS.....	26
TABEL 3.2 RINCIAN IKU PNBP.....	27
TABEL 3.2.1 RINCIAN PNBP BERDASARKAN SUMBERNYA.....	27
TABEL 3.3 IKU OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET NEGARA	28
TABEL 3.4 RINCIAN IKU PERSENTASE REALISASI POKOK LELANG.....	29
TABEL 3.5 RINCIAN IKU PENURUNAN SALDO PIUTANG NEGARA.....	29
TABEL 3.6 RINCIAN IKU IKPL.....	30
TABEL 3.7 RINCIAN IKU EDUKOM	31
TABEL 3.8 RINCIAN IKU KOMPETENSI PENILAI.....	31
TABEL 3.9 RINCIAN IKU SERTIPIKASI	32
TABEL 3.10 RINCIAN IKU EVALUASI KINERJA BMN	33
TABEL 3.11 RINCIAN IKU PENYELESAIAN BKPN	34
TABEL 3.12 RINCIAN IKU KUALITAS LAYANAN PENILAIAN	34
TABEL 3.13 RINCIAN IKU PRODUKTIVITAS LELANG.....	35
TABEL 3.14 RINCIAN IKU IKPA	36
TABEL 3.15 RINCIAN IKU PBJ.....	36
TABEL 3.16 RINCIAN IKU PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI.....	36
TABEL 3.17 RINCIAN IKU KEHUMASAN	37
TABEL 3.18 RINCIAN IKU PENANGANAN HUKUM	38
TABEL 3.19 RINCIAN IKU MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO.....	38
TABEL 3.20 KINERJA ANGGARAN.....	39
TABEL 3.21 IKPA.....	39

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.....	8
Gambar 2. 1 Capaian Kinerja Organisasi.....	23

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-4486/KN.1/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang diwujudkan melalui pelaksanaan program, kegiatan, serta capaian kinerja sepanjang Tahun 2025. Diharapkan, laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil capaian

kinerja, tantangan yang dihadapi, serta langkah strategis yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi. Dengan demikian, laporan ini berfungsi sebagai alat kendali, evaluasi, serta acuan dalam penyusunan rencana kerja Tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian terhadap sembilan belas Indikator Kinerja Utama (IKU), Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2025 sebesar 116,38%, Capaian tersebut tentunya kami jadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar dalam merumuskan kebijakan dan langkah perbaikan kinerja, layanan, serta pencapaian target di masa mendatang.

Kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi yang transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik.

Apresiasi setinggi-tingginya juga kami berikan kepada seluruh pegawai atas dedikasi, karsa, dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja organisasi. Semoga laporan ini bermanfaat serta menjadi pijakan untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Semarang, Februari 2026
Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah
dan D.I. Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2025 adalah rincian yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama Tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta

pengungkapan hasil pengukuran kinerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta selama Tahun 2025.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang terdiri delapan Sasaran Strategis (SS) dengan sembilan belas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memenuhi ekspektasi dan berstatus hijau.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2025 sebesar 116,38%. Pencapaian target dan realisasi IKU Tahun 2025 secara ringkas, sebagai berikut:

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Max. 120	Nilai Perspek tive
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>					110,77
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya				
1a-CP	Indeks Integritas	100	105,32	105,32	
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	118,17%	118,17	
<i>Customer Perspective (20%)</i>					116,72
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal				
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	106,45%	106,45	

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Max. 120	Nilai Perspe ktive	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	115,61%	115,61		
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	383,96%	120		
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	95,17	120		
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	93,78	120		
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70	87,37	120		
Internal Process Perspective (25%)						119,53
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif					
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	118,15%	118,15		
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	119,96%	119,96		
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	189,70%	120		
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	103,99%	120		
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	123,87%	120		
Learning and Growth Perspective (25%)					119,67	
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Max. 120	Nilai Perspe ktive	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120		
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120		
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	100%	120		
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif					
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	6,37	120		
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	118,03	118,03		
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif					
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	96,77	120		
NKO						116,38

TABEL A.1
RINCIAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)


Penjabaran terkait Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta akan tergambar pada setiap bab dalam Laporan Kinerja ini.

Selanjutnya, untuk mendukung capaian kinerja di masa mendatang

beberapa rencana aksi/kegiatan yang perlu dilakukan pada Tahun 2025 yang diuraikan pada bab terakhir pada Laporan Kinerja.

Secara ringkas rencana aksi/kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Bagian Umum mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana untuk bidang teknis maupun unit/kantor dalam menunjang tugas dan fungsi Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, melakukan pengelolaan anggaran dalam rangka pencapaian target dan output, serta pengelolaan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) di Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
2. Bidang PKN melakukan bimbingan kepada KPKNL serta satuan kerja di wilayah Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, melakukan *monitoring* atas tindak lanjut persetujuan persetujuan, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait tugas dan fungsi bidang PKN dalam rangka pencapaian target, serta melakukan pengelolaan aset Bendahara Umum Negara (BUN).
3. Bidang Penilaian melakukan bimbingan teknis, *Focus Group Discussion* (FGD), dan sosialisasi kepada fungsional penilai, melakukan *monitoring* dan evaluasi penilaian yang dilaksanakan, serta melaksanakan survei basis data penilaian.
4. Bidang Piutang Negara melakukan bimbingan koordinasi *monitoring* dan evaluasi terhadap pengelolaan piutang negara, penggalan potensi piutang negara, serta FGD untuk mendapatkan solusi dalam permasalahan Pengurusan Piutang Negara.
5. Bidang Lelang melakukan pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap kinerja Pelelang, Pejabat Lelang (PL) Kelas II, dan Balai Lelang, melakukan publikasi agar masyarakat lebih mengenal pelaksanaan lelang, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan lelang.
6. Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi melakukan pengelolaan, pengawasan, dan *monitoring* kinerja dan risiko, melakukan pembinaan penanganan perkara, pengelolaan media informasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

An illustration on a green background showing several hands in various colors (yellow, brown, green) holding a rolled-up orange document. A white curved line sweeps across the scene from the bottom left towards the center. The overall style is modern and graphic.

Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbang sia-sia, sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01.

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS
- D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
- E. SISTEMATIKA

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta beralamat di Jalan Imam Bonjol 1D Lantai 2-3, Semarang adalah Unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DJKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya

diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan membawahi enam Unit Vertikal yaitu KPKNL Semarang, KPKNL Surakarta, KPKNL Pekalongan, KPKNL Tegal, KPKNL Yogyakarta, dan KPKNL Purwokerto.

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

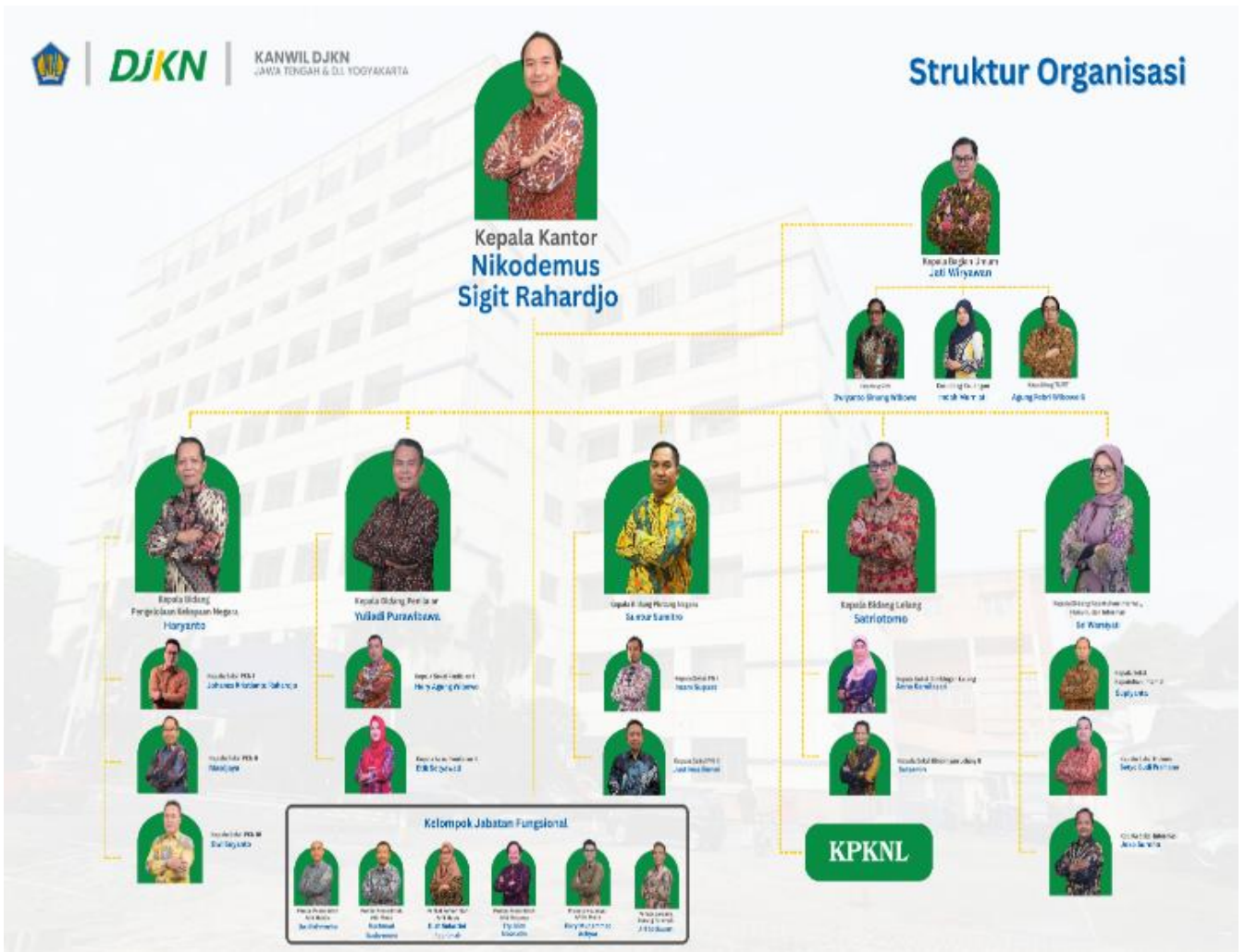
Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta meliputi dua Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Propinsi D.I. Yogyakarta. Kantor vertikal dibawah Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta meliputi enam kantor operasional yaitu :

- 1. KPKNL Semarang
- 2. KPKNL Surakarta
- 3. KPKNL Pekalongan

- 4. KPKNL Tegal
- 5. KPKNL Yogyakarta
- 6. KPKNL Purwokerto

Struktur organisasi Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2022 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari:

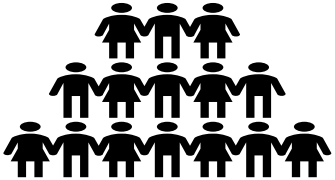
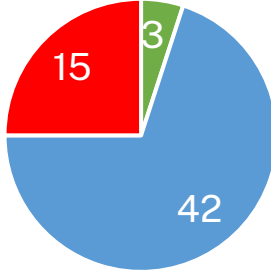
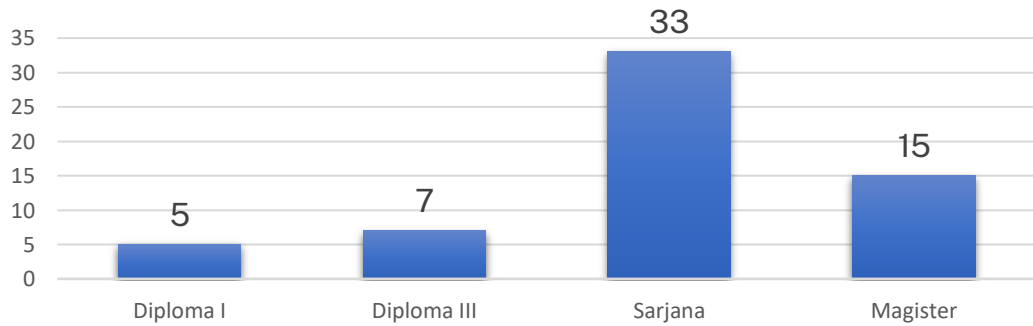


GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

Sumber daya yang dimiliki Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan yaitu :

Sumber daya manusia Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada Tahun 2025 sebanyak enam puluh pegawai, dengan komposisi sebagai berikut:

A. Sumber Daya Manusia

	<p>Jumlah Pegawai Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta</p>										
<p>60</p>											
<p style="text-align: center;">Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan</p>  <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>Golongan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Golongan II</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Golongan III</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Golongan IV</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>		Golongan	Jumlah	Golongan II	3	Golongan III	42	Golongan IV	15		
Golongan	Jumlah										
Golongan II	3										
Golongan III	42										
Golongan IV	15										
<p style="text-align: center;">Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan</p>  <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>Tingkat Pendidikan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diploma I</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Diploma III</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Sarjana</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Magister</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>		Tingkat Pendidikan	Jumlah	Diploma I	5	Diploma III	7	Sarjana	33	Magister	15
Tingkat Pendidikan	Jumlah										
Diploma I	5										
Diploma III	7										
Sarjana	33										
Magister	15										

TABEL 1.1 KOMPOSISI PEGAWAI KESELURUHAN, BERDASARKAN GOLONGAN, DAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

UNIT KERJA KANWIL DJKN	FUNGSIONAL PELELANG AHLI			FUNGSIONAL PENILAI AHLI		
	PERTAMA	MUDA	MADYA	PERTAMA	MUDA	MADYA
	0	0	0	1	2	1
	FUNGSIONAL KEUANGAN APBN			FUNGSI PENATALAKSANA BARANG		
	TERAMPIL		MAHIR	TERAMPIL	MAHIR	
	0		1	1	0	

TABEL 1.2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL

B. Sarana dan Prasarana

Pada Tahun 2025 , Kanwil DJKN
Jawa Tengah dan D.I . Yogyakarta
memiliki beberapa Rumah Dinas

dan Kendaraan Dinas dengan
rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Alamat	Kondisi
1	Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen	Komplek Permata Semeru Blok B No. 12 A	Baik
2	Rumah Negara Gol II Tipe C Permanen	Jl. Musi II RT2/RW4 Bugangan Semarang	Rusak Ringan
3	Rumah Negara Gol II Tipe C Permanen	Jl. Indragiri Raya 27 RT2/RW4 Bugangan Semarang	Baik
4	Rumah Negara Gol II Berupa Mess/Asrama	Jl. Rowosari RT.4/RW1 Sronдол Kulon, Banyumanik Semarang	Baik
5	Rumah Negara Gol II Berupa Mess/Asrama	Jl. Rowosari RT.4/RW1 Sronдол Kulon, Banyumanik Semarang	Baik
6	Rumah Negara Gol II Berupa Mess/Asrama	Jl. Kijang Utara II Blok NO. 11 RT1/RW5 Gayamsari Semarang	Baik

TABEL 1.3 RINCIAN RUMAH DINAS

No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
1.	Kendaraan Roda empat	4	0	2	6
2.	Kendaraan Roda Dua	2	0	1	3

TABEL 1.4 RINCIAN KENDARAAN DINAS

C. Mandat Dan Peran Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208).

DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, DJKN menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
6. Pelaksanaan administrasi DJKN;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai salah unit Vertikal DJKN yang memiliki fungsi melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta memiliki peran strategis sebagai berikut:

1) Pengelolaan Kekayaan Negara

a. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara:

1. Peran strategis di bidang pengelolaan kekayaan negara adalah pengoptimalan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna, hasil guna kekayaan negara serta mewujudkan tertib pengelolaan Kekayaan Negara. Kegiatan Pengelolaan Kekayaan Negara meliputi : Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengelolaan Kekayaan Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
2. Pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi di bidang pengelolaan kekayaan negara.
Peranan pengelolaan kekayaan negara diperlukan

dalam setiap tahapan, mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, sedangkan terkait penilaian barang milik negara, mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisa penggunaan tertinggi dan terbaik.

3. Untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum, DJKN mengawal program sertifikasi Barang Milik Negara berupa tanah. Kegiatan tersebut merupakan sinergi bersama dalam rangka pengamanan aset antara satuan kerja/pengguna barang, pengelola barang dan Badan Pertanahan Negara.

b. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Kontribusi penerimaan negara ini meliputi :

1. Penerimaan Pajak Pusat, dari Pelaksanaan lelang berupa Pajak Penghasilan atas pelaksanaan lelang tanah/bangunan.

2. Penerimaan Pajak Daerah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan (BPHTB) atas pelaksanaan lelang tanah/bangunan.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dapat diperoleh melalui :
 1. Pelayanan pengurusan piutang negara, berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara.
 2. Pelayanan Lelang, berupa hasil lelang dan bea lelang baik yang dilaksanakan oleh KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, Balai Lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara.
 3. PNBP dari Pengelolaan BMN.

2) Pengurusan Piutang Negara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, mengatur bahwa Pengurusan Piutang Negara Bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun.

3) Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penilaian kekayaan negara meliputi pelaksanaan penilaian, kegiatan standardisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi, dan rekomendasi di bidang penilaian. Hasil penilaian barang milik negara tersebut antara lain akan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara, penerbitan surat berharga oleh negara, dan pengurusan piutang negara.

4) Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana penjualan sebagaimana dimaksudkan oleh beberapa peraturan perundangan dan sebagai alternatif sarana transaksi penjualan aset kepada masyarakat.

Dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, lelang dicantumkan sebagai cara pelaksanaan putusan atau ketentuan peraturan perundangan tersebut. Lelang dipilih sebagai cara penjualan karena sifatnya yang transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih

menjamin kepastian hukum dengan adanya akta otentik berupa risalah lelang.

Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta bertugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi, dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang.

Peningkatan kualitas layanan, regulasi, pengawasan, penggalan potensi, dan kemudahan pelaksanaannya terus menerus dilakukan dengan tujuan agar lelang menjadi sarana penjualan yang digunakan secara luas oleh masyarakat (*sales mean auction*).

D. Program Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan

Pada pelaksanaan kegiatan, secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Tahun 2025 telah sesuai dengan yang ditargetkan dan banyak diantaranya mencapai nilai

di atas 100%. Meskipun pada pencapaian target tersebut dapat beberapa persoalan/ permasalahan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dimaksud antara lain:

1. Belum ada kekuatan hukum terhadap Satuan Kerja (Satker) yang melakukan pemanfaatan BMN tanpa melalui persetujuan Pengelola Barang.
2. Minimnya kesadaran Satker terkait tertib administrasi dan terkait pengoptimalan Barang Milik Negara (BMN).
3. Kondisi perekonomian masih dalam keadaan yang tertekan sehingga tingkat *marketability* barang yang dilelang menurun dan memiliki potensi permasalahan hukum.
4. Hasil lelang hak tanggungan, lelang Harta Pailit dan lelang sitaan Pengadilan sebagian besar tidak ada penawar karena objek lelang tidak *marketable*, objek lelang masih dihuni oleh debitur/pemilik jaminan/pihak lain, nilai limit tinggi, dan kurang peminat.
5. Masih adanya keraguan pembeli lelang untuk membeli melalui lelang.
6. Dokumen kepemilikan tanah Satker yang menjadi objek sertifikasi belum lengkap.

7. Terdapat BMN berupa tanah yang masih dalam sengketa.
8. Sebagian besar piutang negara tidak didukung barang jaminan.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis, serta sistematika laporan.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang

- ringkasan penetapan/perjanjian kinerja, metode yang digunakan dalam mengukur kinerja Tahun 2025 serta adendum kinerja.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja beserta analisisnya dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan uraian atas realisasi anggaran yang digunakan.
4. Bab IV Penutup
Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang.

Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02.

RENCANA KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
- C. PENGUKURAN KINERJA
- D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikiran tertentu.

Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 telah menyusun Rencana Strategis dengan berfokus pada Penguatan Fondasi Transformasi, yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Pada periode ini rata-rata pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,3%-8,0%.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah merumuskan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025. Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sebagai unit vertikal DJKN di daerah dalam penyusunan rencana kerja berpedoman kepada Rencana Startegis DJKN 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis DJKN dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk setiap Tahunnya telah dibuat rencana kerja dan penetapan target kinerja yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja *Kemenkeu Two*, *Kemenkeu Three* hingga *Kemenkeu Five*. Dalam pelaksanaan kinerja Tahunan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berpedoman kepada visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program instansi yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Penyusunan rencana kerja dan penetapan sasaran strategis pada Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis DJKN periode 2025-2029. Rencana Strategis ini dirancang melalui proses yang berorientasi pada hasil guna mendukung visi Kementerian Keuangan dalam mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.

Dengan menyelaraskan arah kebijakan pada kerangka Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berkomitmen untuk

menjaga kesinambungan kinerja pelayanan publik yang prima dan berkontribusi nyata dalam pengamanan dan optimalisasi kekayaan negara.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja sendiri merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana disebutkan di atas, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah menetapkan Delapan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya;
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal;
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif;
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;

6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Yang dituangkan kedalam 4 *Perspective*, yaitu :

1. *Stakeholder Perspective*

adalah *Perspective* yang berkaitan dengan *Stakeholder* Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk mengetahui kinerjanya yang paling utama/pokok. *Stakeholder* Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tersebut adalah Direktur Jenderal. Pada *Perspective* ini terdapat satu sasaran strategis yakni Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya.

2. *Customer Perspective*

adalah *Perspective* yang berkaitan dengan *Customer* Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk mengetahui kinerjanya yang paling utama/pokok. *Customer* Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tersebut meliputi:

- a. Kementerian/Lembaga;
- b. Penyerah Piutang;
- c. Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang;
- d. Balai Lelang/PL II.

Perpective ini terdiri dari dua sasaran strategis yaitu:

- a. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal;
- b. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.

3. Internal Process Perspective

adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada *costumer* dan *stakeholder*. *Internal process perspective* terdiri dari dua sasaran strategis yaitu:

- a. Penerapan tata kelola aset yang efektif;
- b. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif.

4. Learning and growth perspective

adalah Merupakan sumber daya internal yang dimiliki sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan organisasi. *Learning and growth perspective* terdiri dari tiga sasaran strategis yaitu :

- a. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
- b. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
- c. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Selanjutnya *Perpective* sasaran strategis tersebut disajikan dalam sembilan belas Indeks Kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Integritas;
2. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang;
3. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara;
4. Persentase realisasi pokok lelang
5. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara;
6. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi;
7. Tingkat kompetensi penilai pemerintah;
8. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan;
9. Persentase evaluasi kinerja BMN;
10. Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara;
11. Tingkat kualitas layanan penilaian;
12. Persentase produktivitas lelang;
13. Indeks kualitas kinerja anggaran;
14. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa;
15. Persentase pengembangan kompetensi pegawai;

16. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan;
17. Indeks penanganan permasalahan hukum;

18. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko;
19. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko;

Gambaran lebih jelas mengenai indeks kinerja tersebut dapat disajikan dalam data sebagai berikut:

A. *Stakeholder Perspective*

Sasaran Strategis : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya		
No	Indeks Kinerja	Target
1.	Indeks Integritas	100
2.	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%

TABEL 2.1 RINCIAN *STAKEHOLDER PERSPECTIVE*

B. *Customer Perspective*

Sasaran Strategis : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal		
No	Indeks Kinerja	Target
1.	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
2.	Persentase realisasi pokok lelang	100%
3.	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
Sasaran Strategis : Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa		
No	Indeks Kinerja	Target
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
2.	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
3.	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70

TABEL 2.2 RINCIAN *CUSTOMER PERSPECTIVE*

C. Internal Process Perspective

Sasaran Strategis : Penerapan tata kelola aset yang efektif		
No	Indeks Kinerja	Target
1.	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
2.	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
Sasaran Strategis : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif		
No	Indeks Kinerja	Target
1.	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%
2.	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
3.	Persentase produktivitas lelang	80%

TABEL 2.3 RINCIAN *INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE*

D. Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif		
No	Indeks Kinerja	Target
1.	Indeks kualitas kinerja anggaran	100%
2.	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%
3.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80
Sasaran Strategis : Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif		
No	Indeks Kinerja	Target
1.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55
2.	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
Sasaran Strategis : Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif		
1.	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80

TABEL 2.4 RINCIAN *LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE*

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berpedoman

kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lain.
3. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target.
4. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian kinerja sendiri merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana disebutkan di atas, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah menetapkan delapan sasaran strategis

yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang produktif dan kredibel;
- b. Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan;
- c. Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif;
- d. Penerapan tata kelola aset yang efektif;
- e. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;
- f. Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif;
- g. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
- h. Pengawasan pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif.

Yang dituangkan kedalam empat *Perspective*, yaitu :

1. *Stakeholder Perspective*

adalah *Prespective* yang berkaitan dengan Stakeholder Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk mengetahui kinerjanya yang paling utama/pokok. *Stakeholder* Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tersebut adalah Direktur Jenderal. Pada *Perspective* ini terdapat satu sasaran strategis yakni

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel.

2. Customer Perspective

adalah *Perspective* yang berkaitan dengan *Customer* Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk mengetahui kinerjanya yang paling utama/pokok. *Customer* Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tersebut meliputi:

- a. Kementerian/Lembaga;
- b. Penyerah Piutang;
- c. Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang;
- d. Balai Lelang/PL II;

Perspective ini terdiri dari dua dengan sasaran strategis yaitu:

- a. Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan;
- b. Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif.

3. Internal Process Perspective

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada *customer* dan *stakeholder*. *Internal process perspective* terdiri dari dua sasaran strategis yaitu:

- a. Penerapan tata kelola aset yang efektif;
- b. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif.

4. Learning and growth perspective

merupakan sumber daya internal yang

dimiliki sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan organisasi.

Learning and growth perspective terdiri dari tiga sasaran strategis yaitu :

- a. Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif;
- b. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
- c. Pengawasan pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif;

Selanjutnya *Perspective* sasaran strategis tersebut disajikan dalam sembilan belas Indeks Kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Integritas;
2. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang;
3. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara;
4. Persentase realisasi pokok lelang;
5. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara;
6. Indeks kepuasan pengguna layanan;
7. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi;
8. Tingkat kompetensi penilai pemerintah;
9. Persentase evaluasi kinerja BMN;
10. Persentase BMN berupa tanah disertipikatkan;
11. Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara;
12. Tingkat kualitas layanan penilaian;
13. Persentase produktivitas lelang;

13. Persentase produktivitas lelang;
14. Indeks kualitas kinerja anggaran;
15. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa;
16. Persentase pengembangan kompetensi pegawai;
17. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan;
18. Indeks penanganan permasalahan hukum;
19. Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko.



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan, tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

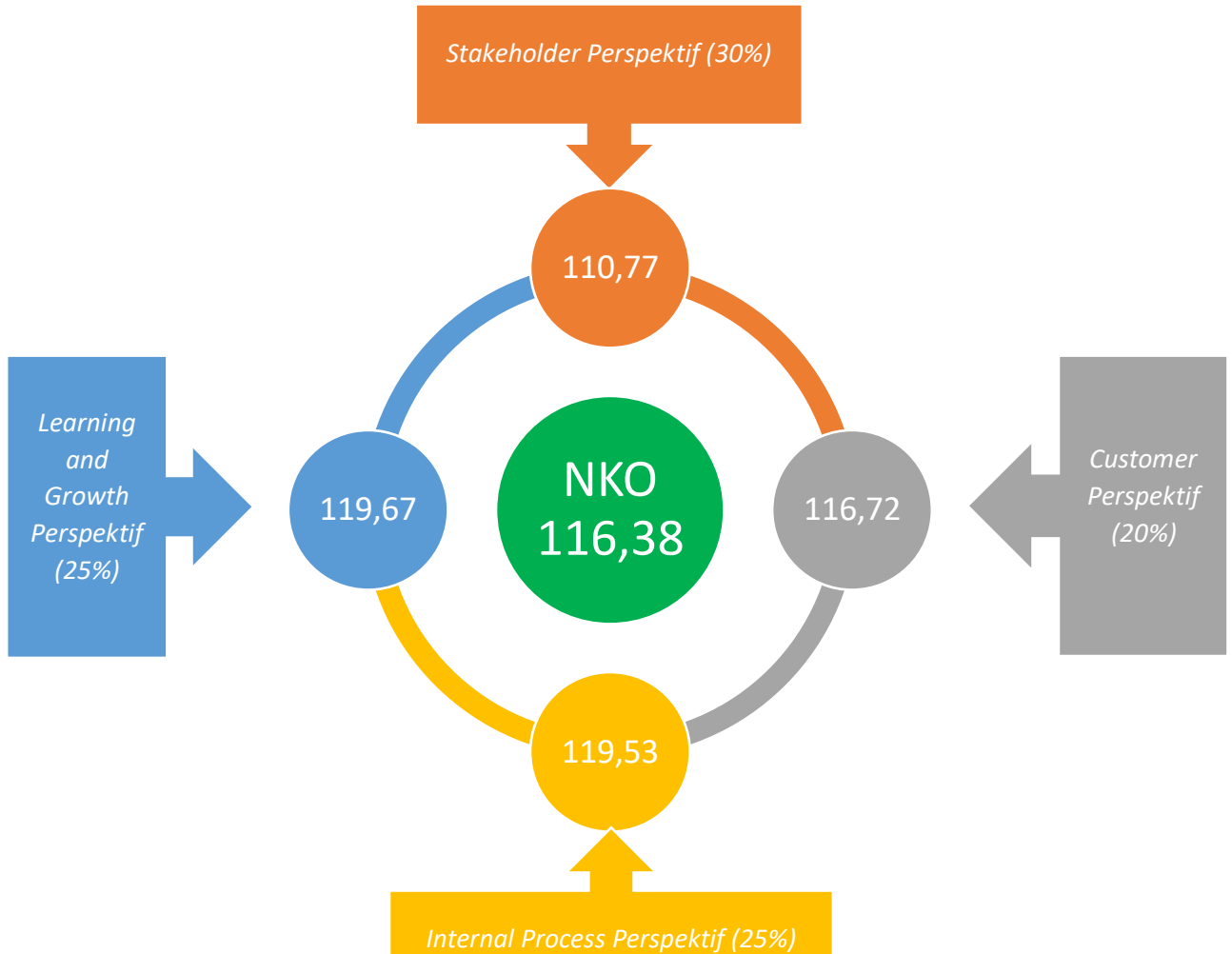
03.

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. KINERJA LAIN-LAIN
- D. EVALUASI PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing *Perspective*. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2025 terhadap sembilan belas IKU *Kemenkeu-Two* Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2025, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,38%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing *Perspective* sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut:



Perbandingan NKO Lima tahun terakhir

Tahun	NKO
2021	111,72
2022	115,41
2023	115,93
2024	115,55
2025	116,38

GAMBAR 2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DAN PERBANDINGAN NKO LIMA TAHUN TERAKHIR

Penjelasan atas capaian delapan Sasaran Strategis dan sembilan belas IKU Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2025 selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU yaitu Indeks Integritas dengan target 100 dan Realisasi sebesar 105,32 serta Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dengan target nominal Rp295.582.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp349.290.131.294,00.

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1a-CP. Indeks Integritas

Realisasi IKU Indeks Integritas pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kanwil DJKN Jateng & DIY	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK <i>Progresif</i>
Realisasi	100	120	120	120	120	105,32	105,32	
Capaian	100	120	120	120	120	105,32	105,32	

TABEL 3.1. RINCIAN INDEKS INTEGRITAS

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu tugas dan fungsi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi dan fungsi. Realisasi Capaian IKU Indeks Integritas pada Tahun 2025 adalah 105,32 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-169/KN.1/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi DJKN Periode Triwulan IV Tahun 2025.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian IKU Indeks Integritas diantaranya :

1. *Campaign*/internalisasi pencegahan pelanggaran disiplin Triwulan IV melalui media sosial (*Instagram*) tanggal 25 November 2025;
2. *Monitoring* dan Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan Triwulan IV sesuai ND-1197/WKN.09/2025 tanggal 5 Desember 2025;
3. Pembinaan/ *Workshop/ Sharing Session* untuk meningkatkan kapasitas entitas Pengadaan Barang/Jasa melalui sosialisasi tanggal 26 September 2025 dan dilaporkan tanggal 29 Oktober 2025;
4. Evaluasi program tali kasih sesuai ND-1188/WKN.09/2025 tanggal 4 Desember 2025.

1b-CP. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Realisasi IKU Persentase realisasi kekayaan negara dan lelang pada penerimaan negara dari pengelolaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

T/R	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							Pol/ KP
	1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	100% (33.813.050.000)	100% (101.439.250.000)	100% (101.439.250.000)	100% (190.124.350.000)	100% (232.700.293.333.34)	100% (295.582.600.000)	100% (295.582.600.000)	Max/ TLK
Realisasi	144,19% (48.754.113.601)	99,02% (100.441.711.673)	99,02% (100.441.711.673)	(146,37%) (278.291.652.435)	132,75% (299.959.972.432)	118,17% (349.290.131.292,14)	118,17% (349.290.131.292,14)	
Capaian	120%	99,02%	99,02%	120%	120%	118,17%	118,17%	

TABEL 3.2 RINCIAN IKU PNB

Realisasi capaian PNB dari (118,17%) dari target Triwulan IV pengelolaan kekayaan negara dan Tahun 2025 sebesar Rp295.582.600.000,00 lelang sampai dengan Triwulan IV 2025 sebesar Rp349.290.131.292,14 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan penghasil PNB	Target	Realisasi	Persentase
PNBP Aset	210.400.000.000,00	236.876.542.924,00	112,58%
PNBP Piutang Negara	89.600.000,00	256.993.568,64	286,82%
PNBP Lelang	85.093.000.000,00	112.156.594.799,50	131,80%

TABEL 3.2.1 RINCIAN PNB BERDASARKAN SUMBERNYA

Target IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Telah melakukan koordinasi dengan KPKNL, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II;
2. Pembinaan secara berkala serta *monitoring* capaian IKU melalui *Dashboard* Focus PN;
3. Mendorong KPKNL untuk lebih fokus pada rencana kerja yang telah disusun.

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Dalam pencapaian sasaran dan D.I. Yogyakarta mengidentifikasi strategis ini Kanwil DJKN Jawa Tengah tiga IKU yaitu :

1. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara dengan target 100% dan Realisasi sebesar 106,45%;
2. Persentase Realisasi Pokok Lelang dengan target Rp3.911.313.000.000,00 dan Realisasi sebesar Rp 4.521.961.891.997,00;

3. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara dengan target sebesar Rp 16.470.644.000,00 dan Realisasi sebesar Rp 63.240.570.427,02.

Uraian dari Capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

2a-CP. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Realisasi IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kanwil DJKN Jateng & DIY	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK <i>Progresif</i>
Realisasi	124,86%	110,85%	110,85%	104,52%	104,52%	106,45%	106,45%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	106,45%	106,45%	

TABEL 3.3 IKU OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET NEGARA

Sampai dengan Akhir 2025, perhitungan optimalisasi aset telah tercapai nilai optimalisasi sebesar 106,45% (capaian IKU maksimal 120%).

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara diantaranya:

1. Penyelesaian target Optimalisasi

Aset;

2. Pembahasan bersama KPKNL dalam penyusunan target Tahun 2026 berikut prognosa capaiannya;
3. Melakukan Evaluasi berkala terhadap capaian tiap triwulan pada seluruh unit kerja di Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

2b-CP. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

T/R	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							Pol/KP
	2b-CP Persentase realisasi pokok lelang							
	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	100% (586.696.950.000)	100% (1.760.090.850.000)	100% (1.760.090.850.000)	100% (2.933.484.750.000)	100% (2.933.484.750.000)	100% (3.911.313.000.000)	100% (3.911.313.000.000)	Max/TL K
Realisasi	182,08% (1.068.254.809.138)	111,11% (1.955.558.858.261)	111,11% (1.955.558.858.261)	110,29% (3.235.438.278.692)	110,29% (3.235.438.278.692)	115,61% (4.521.961.891.997)	115,61% (4.521.961.891.997)	
Capaian	120%	111,11%	111,11%	110,29%	110,29%	115,61%	115,61%	

TABEL 3.4 RINCIAN IKU PERSENTASE REALISASI POKOK LELANG

Realisasi pokok lelang sampai dengan Desember 2025 adalah sebesar Rp4.521.961.891.997,00 (115,67%) dengan rincian capaian realisasi Pokok Lelang Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II sebesar Rp 3.990.315.090.487,00 dan Pokok Lelang Pegadaian sebesar Rp 531.541.831.250,00.

Target IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Telah melakukan rapat *monitoring* dan evaluasi dengan stakeholder dan KPKNL di lingkup kerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
2. Melakukan Rapat *monitoring* dan evaluasi secara rutin dengan KPKNL di lingkup kerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

2c-CP. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

T/R	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							Pol/KP
	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	100% (2.435.000.000)	100% (5.455.400.000)	100% (5.455.400.000)	100% (9.610.750.000)	100% (9.610.750.000)	100% (16.470.644.000)	100% (16.470.644.000)	Max/TLK
Realisasi	210,86% (5.134.518.787,18)	246,09% (14.408.745.931,16)	246,09% (14.408.745.931,16)	158,94% (16.466.117.871,49)	158,94% (16.466.117.871,49)	383,96% (63.240.570.427,02)	383,96% (63.240.570.427,02)	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.5 RINCIAN IKU PENURUNAN SALDO PIUTANG NEGARA

Target realisasi penurunan nilai saldo piutang negara pada Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.

Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebesar Rp16.470.644.000,00. Realisasi penurunan nilai saldo

piutang negara sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp63.240.570.427,02 (383,96%).

Target IKU persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Telah melakukan Koordinasi dan *monitoring* Pengurusan BKPN dengan stakeholder;
2. Pembinaan secara berkala serta *monitoring* capaian IKU melalui *Dashboard* Focus PN;
3. Mendorong KPKNL untuk lebih fokus kepada prognosa capaian.

Sasaran Strategis 3: Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Dalam pencapaian sasaran strategis ini Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengidentifikasi tiga IKU yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dengan target 77 dan Realisasi sebesar 94,49;

2. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi dengan target 74 dan Realisasi sebesar 101,12;
3. Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah dengan target sebesar 70 dan Realisasi sebesar 87,37.

Uraian dari Capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

3a-N. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Jateng & DIY	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							Pol/KP
	Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max/TLK Akumulatif
Realisasi	94,09	93,12	93,60	94,50	94,50	95,77	95,77	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

TABEL 3.6 RINCIAN IKU IKPL

Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 95,77 (konversi 100) sehingga capaian Triwulan IV menjadi sebesar 120. Target IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Telah mengirimkan Nota Dinas kepada seluruh bidang untuk lebih optimal dalam penyampaian Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL);
2. Pengisian SKPL setelah menerima layanan.

3b-N. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Realisasi IKU indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Jateng & DIY	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/TLK Akumulatif
Realisasi	88,77	94,77	93,38	94,71	94,71	93,86	93,78	
Capaian	119,95%	120	120	120	120	120	120	

TABEL 3.7 RINCIAN IKU EDUKASI DAN KOMUNIKASI

Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 93,78 (konversi 100) sehingga capaian Triwulan IV menjadi sebesar 120.

Target IKU Indeks Kepuasan Efektivitas Edukasi dan Komunikasi berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan audiensi/diskusi terkait prosedur penghapusan piutang daerah dan mekanisme penyerahan pengurusan piutang daerah;
2. Mengadakan sosialisasi dan edukasi pengisian *dropbox* kepada Pejabat Lelang II;
3. Pembinaan terkait tugas fungsi Bidang PKN maupun terkait

permasalahan pada Seksi PKN KPKNL, Sosialisasi kepada pihak internal Kemenkeu maupun eksternal;

4. Mengikuti dan melaksanakan *post test* Sosialisasi PMK 99 Tahun 2024, KEP-148/KN.5/2024, dan KEP-149/KN.5/2024 serta KEP-136/KN/2024 dari Direktorat Penilaian;
5. Pelaksanaan sosialisasi PMK Nomor 99 Tahun 2024 pada tanggal 4 Maret 2025, sosialisasi Kepdirjen Nomor KEP-123/KN/2024 dan Nomor KEP-148/KN/2024 pada tanggal 29 Juli 2025 serta KEP-136/KN/2024 pada tanggal 18 September 2025 oleh Kanwil.

3c-N. Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah

Realisasi IKU Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Jateng & DIY	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max/TLK
Realisasi	96	96	96	96	96	87,37	87,37	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

TABEL 3.8 RINCIAN IKUKOMPETENSI PENILAI

Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 87,37 sehingga capaian Triwulan IV menjadi sebesar 120. Target IKU Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Telah melakukan pembinaan berupa *peer review*/kaji ulang atas laporan penilaian Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) Non DJKN;

2. Telah menyampaikan surat pembinaan kepada Instansi Pengguna terkait:

- a. manual IKU Penilai Pemerintah Instansi Pengguna;
- b. Penilaian kinerja Penilai Pemerintah Instansi Pengguna;
- c. Pelaksanaan Sosialisasi s/d September sebanyak 7 kegiatan;
- d. Pelaksanaan ujian tertulis *verkom* pada tanggal 25 September 2025.

Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU yaitu Persentase BMN Berupa tanah yang disertipikasikan dengan

target 100% dan Realisasi 118,15% serta Persentase Evaluasi Kinerja BMN dengan target 100% dan Realisasi sebesar 119,96% dengan rincian sebagai berikut:

4a-CP. Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikasikan

Realisasi IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikasikan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

T/R	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal							Pol/KP
	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikasikan							
	Q2	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/Tik
Realisasi	10,23%	49,02%	49,02%	79,90%	79,90%	118,15%	118,15%	
Capaian	120%	120%	120%	120	120	118,15%	118,15%	

TABEL 3.9 RINCIAN IKU SERTIPIKASI

Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 118,15% sehingga capaian Triwulan IV menjadi sebesar 118,15%.

Target IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikasikan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Telah Mendorong Satuan Kerja, Kantor Pertanahan untuk penuntasan target pokok serta target tambahan. Kanwil berperan aktif untuk koordinasi di level Kanwil BPN.
2. Melakukan Koordinasi dengan Kantor Pertanahan agar serah terima segera dilakukan sehingga

persentase sertifikasi dapat tambahan yang telah dituntaskan.
optimal juga terhadap target

4a-CP. Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Realisasi IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Jateng & DIY		Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara Yang Efektif						
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN						
T/R	Q2	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/Tik
Realisasi	35,32%	86,99%	86,99%	100,49	100,49	119,96%	119,96%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	119,96%	119,96%	

TABEL 3.10 RINCIAN IKU EVALUASI KINERJA BMN

Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 119,96% sehingga capaian Triwulan IV menjadi sebesar 119,96%.

Target IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pengumpulan data evaluasi kinerja dengan cara peninjauan lokasi

BMN, wawancara terkait fungsionalitas BMN dan pengamatan terhadap situasi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pengukuran suatu kinerja BMN.

2. Melakukan Perencanaan yang optimal dalam pencapaian target, baik dari sisi alokasi anggaran, SDM, maupun manajemen waktu pelaksanaan evaluasi kinerja ke lapangan.

Sasaran Strategis 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengidentifikasi tiga IKU yaitu :

1. Pesentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara;
2. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian;
3. Persentase Produktivitas Lelang.

Dengan uraian sebagai berikut :

5a-CP. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Jateng & DIY	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Min/TLK
Realisasi	142,35%	162,65%	162,65%	152,83%	152,83%	181,74%	189,70%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.11 RINCIAN IKU PENYELESAIAN BKPN

Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 189,70% sehingga capaian Triwulan IV menjadi sebesar 120%.

Target IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

5b-CP. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

berhasil dicapai dengan baik karena telah dilakukan pembinaan secara berkala baik secara formal maupun informal terhadap KPKNL.

Kanwil DJKN Jateng & DIY	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	MAX/AVG
Realisasi	102,42	106,42	104,42	105,14	104,66	103,99	103,99	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

TABEL 3.12 RINCIAN IKU KUALITAS LAYANAN PENILAIAN

Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 103,99 sehingga capaian Triwulan IV menjadi sebesar 120%.

Target IKU Indeks Kualitas Layanan Penilaian berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

5c-CP. Persentase Produktivitas Lelang

Realisasi IKU Persentase Produktivitas Lelang pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Telah melakukan *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut kewajiban penginputan pada aplikasi SIP;
2. Pelaksanaan pembinaan dan FGD pada tanggal 9 s.d 10 Desember 2025.

Kanwil DJKN Jateng & DIY	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	106,51%	74,83%	74,83%	98,50%	98,50%	123,87%	123,87%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.13 RINCIAN IKU PRODUKTIVITAS LELANG

Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 123,87% sehingga capaian Triwulan IV menjadi sebesar 120%.

Target IKU Persentase Produktivitas Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

Sasaran Strategis 6: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengidentifikasi tiga IKU yaitu :

1. Indeks Kualitas Anggaran dengan target 100 dan realisasi 120;
2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dengan target 100 dan realisasi 120 ;

6a-CP. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Realisasi IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Jateng & DIY	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							Pol/KP
	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK Akumulatif
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.14 RINCIAN IKU IKPA

Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 120 sehingga capaian Triwulan IV menjadi sebesar 120%.

Target IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran berhasil dicapai dengan baik karena beberapa

1. Melakukan Penggalian potensi lelang;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dalam rangka pendekatan dan sosialisasi kepada pembeli potensial.

3. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan target 80% dan realisasi sebesar 100%.

Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

- tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:
1. Telah melakukan *monitoring* atas implementasi rencana kerja bidang/ bagian yang telah disusun;
 2. Telah melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan Rencana

- Pencairan Dana masing-masing bidang/ bagian;
3. Telah dibuat aplikasi pendukung

monitoring dan evaluasi Capaian Output dan Realisasi Anggaran masing-masing bidang/ bagian.

6b-N. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Jateng & DIY	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK Akumulatif
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.15 RINCIAN IKU PBJ

Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 120 sehingga capaian Triwulan IV menjadi sebesar 120%.

Target IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pelaksanaan Pengadaan sesuai rencana pengadaan dan segera

melakukan input data pada aplikasi terkait;

2. Telah menjalin sinergi dan koordinasi yang baik dengan penyedia jasa;
3. Telah dilakukan *monitoring* dan Evaluasi secara berkala terhadap progres pengerjaan pengadaan barang dan jasa.

6c-N. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Jateng & DIY	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK Progresif
Realisasi	23,02%	80%	80%	88%	88%	93,55%	100%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.16 RINCIAN IKU PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 93,55% sehingga capaian Triwulan IV menjadi sebesar 120%.

Target IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai berhasil dicapai dengan baik karena

beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. *Monitoring* pengembangan kompetensi pegawai;
2. Mengimbuu kepada pegawai melalui *Whatsapp Group* (WAG) dan secara langsung;
3. Memberikan informasi daftar pelatihan yang tersedia;
4. Membuat nota dinas *monitoring* capaian pengembangan

- kompetensi;
5. Membuat Nota Dinas usulan pelatihan pada bagian dan bidang;
6. Terus mendorong dan memotivasi pegawai untuk melakukan pengembangan kompetensi;
7. Berkoordinasi dengan bidang untuk ikut melakukan *monitoring* pegawai yang belum melaksanakan pengembangan kompetensi.

Sasaran Strategis 7: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU yaitu Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan Indeks Penanganan Permasalahan Hukum dengan rincian sebagai berikut :

7a-CP. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Jateng & DIY	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	Max/TLK Progresif
Realisasi	6,73	6,73	6,73	4,42	5,96	5,21	6,37	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.17 RINCIAN IKU KEHUMASAN

Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 6,37 sehingga capaian Triwulan IV menjadi sebesar 120%.

Target IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Manajemen Media Sosial:
 - a. Jadwal strategi komunikasi lingkup kanwil telah

disampaikan dan dibuat secara berkala tiap bulan;

- b. *Monitoring* dan evaluasi atas realisasi Strakom jika berasal dari Kantor pusat dan/atau Setjen Kemenkeu (Biro KLI).

2. *Employee Advocacy* (EA):

- a. Update perkembangan dan capaian EA telah disampaikan dan dikoordinasikan secara realtime melalui *whatsapp*

- group* telah dibuat; ditetapkan dalam surat
- b. Permintaan daftar nama keputusn tim EA Tahun 2026.
pegawai yang akan

7b-N. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Realisasi IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Jateng & DIY	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK Akumulatif
Realisasi	112,11	113,28	113,28	116,62	116,62	118,03	118,03	
Capaian	112,11	113,28	113,28	116,62	116,62	118,03	118,03	

TABEL 3.18 RINCIAN IKU PENANGANAN HUKUM

Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 118,03 sehingga capaian Triwulan IV menjadi sebesar 118,03%.

Target IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Telah menghadiri sidang sesuai jadwal/relas dan SOP yang telah

ditentukan oleh Pengadilan Negeri/Agama;

2. Melaksanakan proses persidangan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Proses persidangan melalui *e-litigasi* telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan semua dokumen perkara telah diupload tepat waktu.

Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengidentifikasi

Satu IKU yaitu Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko dengan rincian sebagai berikut :

8a-N. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Realisasi IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Jateng & DIY	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK Akumulatif
Realisasi	99,93	94,92	94,92	96,11	96,11	96,77	96,77	
Capaian	120	118,65	113,28	120	120	120	120	

TABEL 3.19 RINCIAN IKU MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO

Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 96,77 sehingga capaian Triwulan IV menjadi sebesar 120%.

Target IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. melakukan *monitoring* kinerja

pegawai setiap bulannya;

2. pelaksanaan koordinasi dengan kantor pusat terkait kelengkapan dokumen kinerja organisasi dan risiko;
3. pemenuhan dokumentasi kegiatan kinerja organisasi dan risiko.

B. Kinerja Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis dan IKU terdapat ketersediaan anggaran di Tahun 2025 dengan pembagian Jenis Belanja, Pagu Anggaran, Realisasi dan Penyerapan (%) :

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Blokir	Pagu Non Blokir	Realisasi	%
Belanja Barang	3.130.831.000,00	660.068.000,00	2.470.763.000,00	2.470.247.669,00	99,98%
Belanja Modal	2.243.890.000,00	1.509.916.000,00	733.974.000,00	713.553.438,00	97,22%
Total	5.374.721.000,00	2.169.984.000,00	3.204.737.000,00	3.183.801.107,00	99,35%

TABEL 3.20 KINERJA ANGGARAN

Ruang lingkup perhitungan IKI Indeks Kualitas Kinerja Anggaran mengacu pada ketentuan PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7) yang merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran;
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	120	120

TABEL 3.21 IKPA

C. Kinerja Lain-Lain

Sepanjang Tahun 2025, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta selalu berupaya

memberikan kinerja terbaiknya dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi. Atas hasil kerja keras dan semangat para pegawainya, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berhasil

menorehkan prestasi diantaranya sebagai berikut :

1. Juara III kategori Kanwil DJKN Performa Lelang Terbaik Kategori I dalam rangkat pemberian apresiasi Insan Lelang Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2025;
2. Berhasil melakukan Penilaian Sumber Daya Alam di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan D.I, Yogyakarta Bersama dengan Kantor Pusat DJKN berupa Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Pulau Panjang pada tanggal 8 s.d 15 September 2025;
3. Berhasil menyelesaikan Pemantapan status ABMA/T menjadi Tanah Kesultanan.

D.Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

1. Akuntabilitas kinerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan tercapainya Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,38%. Dari hasil tersebut menunjukkan peningkatan dari Tahun sebelumnya sebanyak 0,82 poin;
2. Capaian ini didukung oleh keberhasilan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berjumlah 19 poin dalam mencapai target dengan status hijau atau realisasi di atas 100%;

3. Salah satu parameter keberhasilan akuntabilitas kinerja lainnya adalah dengan tingginya tingkat kepercayaan publik, di mana Indeks Kepuasan Pengguna Layanan mencapai skor 95,77 dari skala 100;
4. Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta juga berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tertinggi sepanjang lima Tahun terakhir yaitu sebesar 116,38%, mengalami peningkatan dibandingkan NKO di tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan komitmen dalam rangka perbaikan terus menerus dan memberikan upaya optimal dalam seluruh pelaksanaan tugas;
5. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Kanwil DJKN DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dalam menjalankan tugas sebagai pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang menghadapi tantangan di Tahun 2025;
6. Seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta selama

Tahun 2025;

7. Laporan Kinerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2025 diharapkan mampu menjadi bahan refleksi, koreksi, evaluasi sekaligus motivasi untuk memperbaiki area tugas fungsi yang belum optimal serta peningkatan area tugas fungsi yang selama ini telah baik dalam rangka perbaikan

dan peningkatan kinerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta di periode yang akan datang sehingga peran dan keberadaan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui penyediaan layanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.



Garis *finish* bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkul kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

04.

PENUTUP

Laporan Kinerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan salah satu tools dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja sasaran didasari atas penilaian pada IKU. Pada awal Tahun 2025, telah ditetapkan delapan Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam sembilan belas IKU.

Penetapan Sasaran Strategis dan IKU tersebut dituangkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2025 yang juga merupakan turunan dari IKU DJKN.

Akuntabilitas kinerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan tercapainya Nilai Kinerja Organisasi

(NKO) sebesar 116,38%. Dari hasil tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 0,82 poin.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mempunyai beberapa strategi, antara lain:

A. Bagian Umum

1. Menyiapkan pelaksanaan Rakerda Tahun 2026, bersama-sama dengan KPKNL (khususnya Subbagian Umum);
2. Melakukan pembinaan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-157/KN/2025 terkait tugas dan fungsi Bagian Umum pada KPKNL lingkup wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta setiap triwulanan;
3. Melakukan *monitoring* penyusunan dan penandatanganan SKP Pegawai Tahun 2026 pada bulan Januari 2026;
4. Melakukan kegiatan ABK kanwil dan mengkoordinasikan dengan seluruh KPKNL bulan Januari sd Februari 2026;
5. Melakukan sidang penilaian peringkat dan jabatan pelaksana serta mengkoordinasikan sidang penilaian untuk seluruh KPKNL;
6. Menyiapkan infografis dan video tentang pengelolaan kinerja pegawai pada semester 1 dan semester 2;

7. Melakukan kegiatan manajemen pengetahuan lingkup kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2026;
8. Menyiapkan sarpras dan dukungan atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang teknis, maupun kegiatan yang dilakukan oleh unit/kantor lain yang melaksanakan kegiatan rapat/FGD/kunjungan pada Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
9. Berkolaborasi, berkoordinasi, serta berkontribusi dengan KPTIK BMN dan pihak lain pada kegiatan bersama Kemenkeu Satu Provinsi Jawa Tengah;
10. Melakukan koordinasi teknis dengan setiap bidang secara periodik untuk memastikan target Realiasi Anggaran dan Capaian Output setiap triwulan dapat tercapai serta mengurangi deviasi realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD);
11. Melakukan Pembayaran Tunjangan Kinerja pegawai, Pembayaran SPD, memproses penggantian Ganti Uang Persediaan, menyampaikan data capaian output dan menyampaikan LPJ Bendahara secara tepat waktu;
12. Mengusulkan angka dasar, pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi dalam rangka penyusunan anggaran Tahun berikutnya;
13. Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan dan revisi hal III DIPA setiap triwulan;
14. Menyusun laporan keuangan tingkat satker dan wilayah untuk periode semester I, triwulan III, dan Tahunan (*unaudited dan audited*);
15. Mengajukan SKPP gaji pegawai pensiun dan membuat SKPP tukin pegawai mutasi keluar;
16. Melakukan rekonsiliasi PNBPL II antara omspan dan *dropbox* lelang setiap triwulan dan rekonsiliasi data monsakti dengan KPPN;
17. Melaksanakan *Resource Forum* yang melibatkan Kepala Kanwil dan seluruh bidang/ bagian dalam rangka penyusunan anggaran Tahun berikutnya;
18. Menyampaikan Laporan Daftar Arsip Aktif periode penciptaan Desember 2025 s.d. Mei 2026 dan periode penciptaan Juni 2026 s.d. November 2026;
19. Menyampaikan usul pemusnahan arsip inaktif yang telah memenuhi Jadwal Retensi Arsip.

B. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

1. Melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara antara lain melalui pembinaan langsung, *monitoring* dan evaluasi melalui nota dinas,

- dan verifikasi produk hukum yang diterbitkan KPKNL;
2. Melakukan bimbingan teknis kepada satuan kerja baik melalui pelaksanaan sosialisasi maupun menjadi narasumber;
 3. Melaksanakan penyelesaian usulan atau tindak lanjut atas permohonan pengelolaan BMN yang disampaikan oleh Satuan Kerja;
 4. Melaksanakan penyelesaian usulan atau tindak lanjut atas permohonan peruntukan barang eks Kepabebean dan Cukai;
 5. Melakukan verifikasi penghitungan Tingkat Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dan verifikasi atas Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio);
 6. Melaksanakan pengelolaan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) di lingkungan TAD IX Semarang;
 7. Melakukan penyusunan laporan periodik meliputi: Laporan SBSK, Laporan Perkembangan ABMA/T, dan Laporan BMN Idle;
 8. Melakukan penyusunan dan penyiapan data dalam rangka pengelolaan kinerja dan risiko Bidang PKN;
 9. Menyusun Tim Kelompok Kerja Tingkat Wilayah Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah;

10. Melakukan koordinasi dan pembahasan bersama terkait rencana Sertifikasi BMN dengan Satuan Kerja, Kantor Pertanahan dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
11. Melakukan Rekonsiliasi Aset Properti Eks BPPN, kelolaan PT PPA dan BDL;
12. Melakukan penyusunan laporan Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Properti Eks BDL;
13. Melaksanakan Sosialisasi SIMAN Versi Dua pada Satker di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
14. Melaksanakan pengelolaan BMN Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi lingkup Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
15. Melaksanakan pengelolaan BMN Eks PT Pertamina lingkup Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
16. Melaksanakan pengelolaan BMN Hulu Migas lingkup Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

C. Bidang Piutang Negara

1. melakukan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penghapusan piutang negara, dan melakukan bimbingan teknis, pembinaan,

evaluasi, pelaksanaan penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

2. Meningkatkan koordinasi, *monitoring* dan evaluasi pengurusan piutang negara pada KPKNL;
3. Melakukan Pembinaan dengan cara FGD terkait mendapatkan solusi permasalahan Hukum Piutang negara;
4. Melakukan penggalian piutang dan sekaligus sosialisasi kepada pemerintah daerah/ kementerian/ lembaga tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dan mekanisme penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN;

D. Bidang Penilaian

1. melakukan bimbingan teknis/sosialisasi/FGD terkait bidang penilaian kepada para pejabat fungsional penilai;
2. Meningkatkan koordinasi, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penilaian pada KPKNL;
3. Melaksanakan survei lapangan, menyusun laporan penilaian,

pemaparan dan kaji ulang laporan penilaian;

4. Melaksanakan tahapan penyusunan sampai dengan penetapan DKPB;
5. Melaksanakan tahapan penyusunan sampai dengan penetapan DKPS;
6. Melaksanakan survei basis data, perekaman pada aplikasi SIP survei dan verifikasi data KPKNL.

E. Bidang Lelang

1. Melakukan pembinaan, pengawasan, *monitoring* dan evaluasi kinerja Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
2. Meningkatkan publikasi melalui media informasi/media sosial dengan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu, Pemerintah Daerah/Kota, Himbara, SMV, OJK, Bank Indonesia misalnya radio, televisi, kegiatan publik yang banyak dihadiri oleh masyarakat antara lain melalui RRI, TVRI, *car free day*, pameran, sosialisasi, *DJKN Goes To Campus*;
3. Melakukan bimbingan teknis/sosialisasi/FGD dan pemberian dukungan serta asistensi kepada KPKNL atas permasalahan yang dihadapi dalam

- pelaksanaan lelang, yang direncanakan dilaksanakan secara Triwulan atau apabila terdapat hal-hal yang perlu segera didiskusikan dengan mengundang narasumber dari Direktorat Lelang dan narasumber terkait;
4. Melakukan koordinasi dengan Kanwil Perbankan di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk optimalisasi kinerja penjualan melalui lelang;
 5. Bersama dengan PL Kelas 2, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD Persero, perbankan dan stakeholder sebagai Pemohon Lelang Sukarela agar Pejabat Lelang Kelas II dan lelang semakin dikenal oleh masyarakat dan instansi terkait sehingga diharapkan semakin meningkatkan kinerja lelang;
 6. Melaksanakan penyempurnaan aplikasi Simelinda dan dashboard lelang Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang digunakan sebagai alat bantu pelaporan dan *monitoring* kinerja PL Kelas II dan Balai Lelang;
 7. Melakukan pemeriksaan Risalah Lelang untuk seluruh KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang di wilayah Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk periode 2025. Hasil pemeriksaan akan menjadi

- masuk dan bahan wasdal Tahun 2026;
8. Tanggal 2 s.d. 10 Februari 2026 melakukan pemeriksaan pada KPKNL Semarang untuk Risalah Lelang dari Pejabat Lelang Kelas I;
 9. Melakukan sosialisasi dropbox terhadap Pejabat Lelang Kelas I (PL I) dan Kelas II (PL II). Dropbox merupakan cara melakukan pelaporan yang terkonsolidasi. Sosialisasi akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2026.

F. Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi

1. Melaksanakan rapat *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja secara Periodik;
2. Melakukan *monitoring* dan evaluasi sekaligus penilaian Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko terhadap KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dengan menggunakan perangkat yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat;
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi selaku Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) II terhadap KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi penanganan benturan kepentingan terhadap Kanwil selaku satker dan

- KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
5. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pengendalian, kode etik, dan pelaksanaan efisiensi terhadap Kanwil selaku satker dan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
 6. Mengadakan kegiatan anti korupsi dan anti gratifikasi dalam bentuk sosialisasi dan/atau internalisasi dengan peserta dari internal dan/atau eksternal;
 7. Mengadakan peringatan hari HAKORDIA;
 8. Melakukan pembinaan tugas dan fungsi Bidang KIHl kepada KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
 9. Melakukan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Bidang KIHl;
 10. Melakukan pengisian data analisis beban kinerja Bidang KIHl;
 11. Melakukan rapat rencana kerja Tim Kehumasan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
 12. Melakukan dokumentasi dan/atau Peliputan kegiatan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta (tugas dan fungsi dan nontugas dan fungsi);
 13. Melakukan pengelolaan website Kanwil (publikasi Berita, Artikel, Kilas Peristiwa, Profil, dan pembaharuan Informasi Publik);
 14. Melakukan pemantauan pengelolaan *website* KPKNL di

- lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
15. Melakukan penyusunan Strategi Komunikasi Tahunan dan Bulanan Unit Vertikal di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
 16. Melakukan pemenuhan Agenda *Setting* Kemenkeu dan Strategi Komunikasi DJKN;
 17. Melakukan pelaporan Pelaksanaan Strategi Komunikasi DJKN Semesteran di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
 18. Melakukan pengelolaan media sosial Kanwil Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
 19. Melakukan pemantauan pengelolaan media sosial unit vertikal di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
 20. penyusunan Laporan Bulanan Pengelolaan Media Sosial Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
 21. Melakukan pemantauan pelaksanaan *Employee Advocacy* di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
 22. Menyelesaikan permohonan pada aplikasi kehumasan dan TIK - https://sites.google.com/view/laya_nanseksiinformasi/.
 23. Menyelesaikan permohonan informasi publik pada Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;

24. Menyampaikan permintaan Laporan Informasi Publik Tahunan kepada PPID Tingkat III;
25. Menyampaikan Laporan Tahunan PPID Tingkat II kepada PPID Tk. I;
26. Melakukan penyusunan Surat Keputusan Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tentang Tim Keamanan Informasi Di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2026;
27. Melakukan penyusunan Laporan Tim Keamanan Informasi Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
28. Menyiapkan bahan *Regional Chief Economist Assets and Liabilities Committee (RCE ALCo)* Regional Provinsi Jawa Tengah;

Laporan Kinerja 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025. Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun dan semoga dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholder Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Saran, kritik,

29. Memberikan layanan TIK di lingkup Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
30. Melakukan *Training of Trainer (TOT)* penggunaan aplikasi CRM Pro untuk petugas Layanan Informasi Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
31. Menyelesaikan tiket yang diterima via aplikasi CRM Deskpro Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
32. Melakukan pemantauan penggunaan aplikasi CRM Pro pada Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
33. Melaksanakan Penanganan Perkara dengan Efektif, Efisien, dan Tuntas;
34. Melakukan *Monitoring* Akurasi data Sibankum secara Periodik;
35. Melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi.

dan masukan yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta di masa yang akan datang. Pada akhirnya, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta belum berpuas diri atas capaian yang sudah ada dan akan terus berusaha melakukan upaya perbaikan diri terutama dalam hal peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder*.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
2. DIPA Petikan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
3. Penghargaan apresiasi Insan Lelang Indonesia





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-18/KN/2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

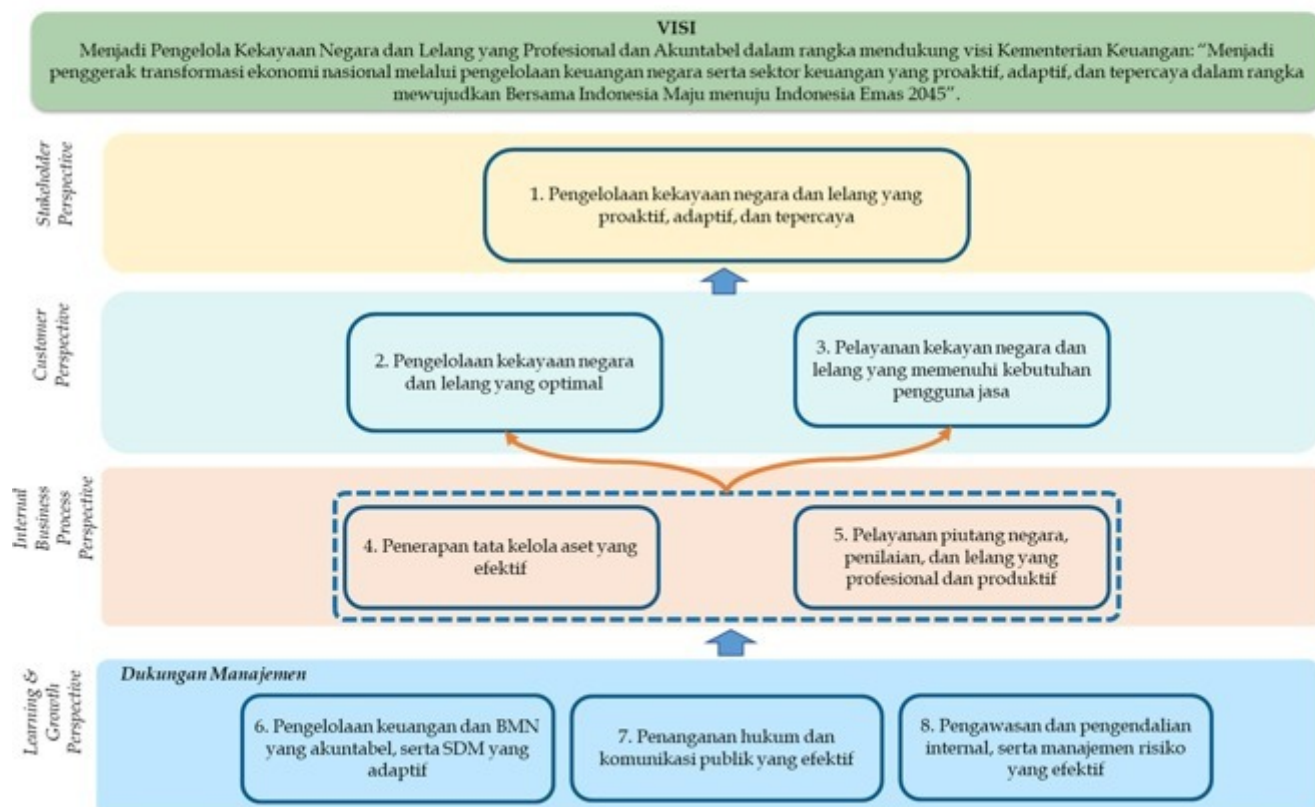


Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp295,5 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp3,9 T)
		2b-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp14,8 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3c-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
		4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

Anggaran

Rp1,189,407,000



1. Komunikasi, Edukasi dan Standarisasi	Rp193,624,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp384,436,000
3. Pengelolaan Aset	Rp597,595,000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp13,752,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp3,868,413,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi	Rp27,780,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp3,724,048,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp67,457,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan pengawasan Internal	Rp49,128,000

Semarang, Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp295,5 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp3,9 T)
2b-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp14,8 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

Semarang, Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN		Januari - Maret	Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/di manfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1-Q4	1. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	0
				April - Juni	Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan	Laporan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan			
				Juli - September	Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan	Laporan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan			
				Oktober - Desember	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan			

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



Semarang, Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19720902 199301 1 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp295,5 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp3,9 T)	Penerima Layanan
		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp14,8 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



		Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Semarang, Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo
19720902 199301 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
19660423 199010 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [TanggalIND]



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	289 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp295,5 M)
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp3,9 T)
2b-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp14,8 M)
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4a-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Semarang, Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo
19720902 199301 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban
19660423 199010 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [TanggalIND]



RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			1,169,103,000	
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			193,624,000	
4796.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	610.0 orang, kegiatan		193,624,000	

	Lokasi : KOTA SEMARANG				
4796.AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	500.0 orang		143,590,000	
100	Tidak Ada Komponen			143,590,000	U
A	Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD/Monev di Bidang Barang Milik Negara			102,228,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.026-Semarang I)			60,900,000	RM
	- Biaya Percetakan Backdrop, Banner dan Plakat [3 FREK]	3.0 FREK	1,380,000	4,140,000	
	- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [115 ORG x 2 FREK x 3 KEG]	690.0 OK	60,000	41,400,000	
	- Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [160 ORG x 3 FREK x 2 KEG]	960.0 OK	16,000	15,360,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.026-Semarang I)			5,400,000	RM
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 2 JAM x 3 FREK]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.026-Semarang I)			33,048,000	A RM
	> Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD/Monev ke Satuan Kerja/Instansi Lain			33,048,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD/Monev ke Satuan Kerja/Instansi Lain [2 ORG x 3 HARI x 3 FREK]	18.0 OH	296,000	5,328,000	*
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD/Monev ke Satuan Kerja/Instansi Lain [2 ORG x 2 HARI x 3 FREK]	12.0 OH	700,000	8,400,000	*
	- Biaya Transport PP- Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD/Monev ke Satuan Kerja/Instansi Lain [2 ORG x 3 FREK]	6.0 OK	400,000	2,400,000	*
	>> Monitoring dan Evaluasi ke KPKNL		0	16,920,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - Monitoring dan Evaluasi ke KPKNL [2 ORG x 2 HARI x 5 LOK x 1 FREK]	20.0 OH	296,000	5,920,000	*
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - Monitoring dan Evaluasi ke KPKNL [2 ORG x 1 HARI x 5 LOK x 1 FREK]	10.0 OH	700,000	7,000,000	*
	- Biaya Transport - Monitoring dan Evaluasi ke KPKNL [2 ORG x 5 FREK]	10.0 OK	400,000	4,000,000	*
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.026-Semarang I)			2,880,000	A RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [2 ORG x 1 HARI x 12 FREK]	24.0 OH	120,000	2,880,000	*
B	Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD/Monev di Bidang Penilaian			41,362,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.026-Semarang I) - Biaya Percetakan Backdrop, Banner dan Plakat [1 FREK] - Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [43 ORG x 2 FREK] - Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [75 ORG x 1 FREK]	1.0 FREK 86.0 OK 75.0 OK	3,958,000 60,000 16,000	10,318,000 3,958,000 5,160,000 1,200,000		RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.026-Semarang I) - Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 2 JAM x 1 FREK]	2.0 OJ	900,000	1,800,000 1,800,000		RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.026-Semarang I) > Pembinaan Penilai Pemerintah - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - Pembinaan Penilai Pemerintah [3 OR x 2 HARI x 5 FREK] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat - Pembinaan Penilai Pemerintah [3 ORG x 1 HARI x 5 FREK] - Biaya Transport - Pembinaan Penilai Pemerintah [3 ORG x 5 FREK] > Verifikasi Kompetensi Penilai - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - Verifikasi Kompetensi Penilai [2 ORG x 2 HARI x 1 FREK] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - Verifikasi Kompetensi Penilai [2 ORG x 1 HARI x 1 FREK] - Biaya Transport - Verifikasi Kompetensi Penilai [2 ORG x 1 FREK]	30.0 OH 15.0 OH 15.0 OK 4.0 OH 2.0 OH 2.0 OK	296,000 700,000 400,000 296,000 700,000 520,000	29,004,000 25,380,000 8,880,000 10,500,000 6,000,000 3,624,000 1,184,000 1,400,000 1,040,000	A * * * * * * * *	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.026-Semarang I) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [1 ORG x 1 HARI x 2 FREK]	2.0 OH	120,000	240,000 240,000	A *	RM
4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	50.0 orang		30,240,000		
100	Tidak Ada Komponen			30,240,000	U	
A	<i>Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD/Monev di Bidang Piutang Negara</i>			<i>30,240,000</i>		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.026-Semarang I) - Biaya Percetakan Backdrop, Banner dan Plakat - Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [34 ORG x 2 FREK x 2 KEG] - Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [30 ORG x 2 FREK x 2 KEG]	1.0 FREK 136.0 OK 120.0 OK	1,800,000 30,000 16,000	7,800,000 1,800,000 4,080,000 1,920,000		RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.026-Semarang I) - Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 1 FREK]	4.0 OJ	900,000	3,600,000 3,600,000		RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
 UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
 ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.026-Semarang I)			16,920,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [2 ORG x 2 HARI x 5 FREK]	20.0 OH	296,000	5,920,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [2 ORG x 1 HARI x 5 FREK]	10.0 OH	700,000	7,000,000	*	
	- Biaya Transport [2 ORG x 5 FREK]	10.0 OK	400,000	4,000,000	*	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.026-Semarang I)			1,920,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [2 ORG x 1 HARI x 8 FREK]	16.0 OH	120,000	1,920,000	*	
4796.AEF.003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	60.0 orang		19,794,000		
100	Tidak Ada Komponen			19,794,000	U	
<i>A</i>	<i>Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD/Monev di Bidang Lelang</i>			<i>19,794,000</i>		
521211	Belanja Bahan (KPPN.026-Semarang I)			8,802,000		PNP
	- Biaya Percetakan Backdrop, Banner dan Plakat	2.0 KEG	173,000	346,000		
	- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [55 ORG x 2 FREK]	110.0 OK	60,000	6,600,000		
	- Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [58 ORG x 2 FREK]	116.0 OK	16,000	1,856,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.026-Semarang I)			9,552,000	A	PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [2 ORG x 2 HARI x 3 FREK]	12.0 OH	296,000	3,552,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [2 ORG x 1 HARI x 3 FREK]	6.0 OH	700,000	4,200,000	*	
	- Biaya Transport [2 ORG x 3 FREK]	6.0 OK	300,000	1,800,000	*	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.026-Semarang I)			1,440,000	A	PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [2 ORG x 2 HARI x 3 FREK]	12.0 OH	120,000	1,440,000	*	
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			384,436,000		
4797.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	22.0 Laporan, Rekomendasi		384,436,000		
4797.FAE.001	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	1.0 Rekomendasi		297,364,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			297,364,000	U	
<i>A</i>	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi</i>			<i>18,189,000</i>		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.026-Semarang I)			17,469,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 3 HARI x 3 FREK]	27.0 OH	296,000	7,992,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [3 ORG x 2 HARI x 3 FREK]	18.0 OH	402,000	7,236,000	*	
	- Biaya Transport [3 ORG x 3 FREK]	9.0 OK	249,000	2,241,000	*	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.026-Semarang I) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [2 ORG x 1 HARI x 3 FREK]	6.0 OH	120,000	720,000	A	RM
B	<i>Koordinasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) dan K/L</i>			182,400,000		
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.026-Semarang I) > Honorarium Tim Kelompok Kerja Tingkat Kanwil			178,800,000	A	RM
	- Wakil Ketua Pokja [4 ORG x 12 BLN]	48.0 OK	125,000	6,000,000	*	
	- Anggota Pokja [144 ORG x 12 BLN]	1728.0 OK	100,000	172,800,000	*	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.026-Semarang I) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 1 KEG]	4.0 OJ	900,000	3,600,000		RM
C	<i>Penyusunan Daftar Nominatif dan Indikatif</i>			96,775,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.026-Semarang I) > Rapat Penyusunan dan Penetapan Daftar Nominatif TA 2025 serta Penyusunan Daftar Indikatif TA 2026			3,550,000		RM
	- Makan Rapat Biasa [25 ORG x 2 FREK]	50.0 OK	55,000	2,750,000		
	- Snack Rapat Biasa [25 ORG x 2 FREK]	50.0 OK	16,000	800,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.026-Semarang I) - Uang Harian Perjalanan Dinas [25 ORG x 2 HARI x 3 KEG]	150.0 OH	296,000	44,400,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [25 ORG x 1 HARI x 3 KEG]	75.0 OH	402,000	30,150,000	*	
	- Transportasi [25 ORG x 3 KEG]	75.0 OK	249,000	18,675,000	*	
4797.FAE.002	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	1.0 Rekomendasi		42,492,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			42,492,000	U	
A	<i>Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara</i>			42,492,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.026-Semarang I) - Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [27 ORG x 8 FREK]	216.0 OK	54,000	11,664,000		RM
	- Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [27 ORG x 8 FREK]	216.0 OK	16,000	3,456,000		
	- Biaya Percetakan Backdrop, Banner dan Plakat	1.0 FREK	55,000	55,000		
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.026-Semarang I) - Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan Kepmen) [2 ORG x 21 KALI]	42.0 OB	363,700	15,275,000	*	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.026-Semarang I)			10,122,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [2 ORG x 2 HARI x 3 FREK]	12.0 OH	296,000	3,552,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [2 ORG x 1 HARI x 3 FREK]	6.0 OH	700,000	4,200,000	*	
	- Biaya Transport [3 ORG x 2 FREK]	6.0 OK	395,000	2,370,000	*	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.026-Semarang I)			1,920,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [2 ORG x 1 HARI x 8 FREK]	16.0 OH	120,000	1,920,000	*	
4797.FAE.003	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	20.0		44,580,000		
100	Tidak Ada Komponen			44,580,000	U	
A	<i>Pemeriksaan Minuta Risalah Lelang</i>			<i>44,580,000</i>		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.026-Semarang I)			43,500,000	A	PNP
	> KPKNL Surakarta			13,612,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - KPKNL Surakarta [2 ORG x 3 HARI x 2 FREK]	12.0 OH	296,000	3,552,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - KPKNL Surakarta [2 ORG x 2 HARI x 4 FREK]	16.0 OH	600,000	9,600,000		
	- Biaya Transport - KPKNL Surakarta [2 ORG x 2 FREK]	4.0 OK	115,000	460,000		
	> KPKNL Pekalongan, KPKNL Tegal dan KPKNL Purwokerto			18,304,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - KPKNL Pekalongan, KPKNL Tegal dan KPKNL Purwokerto [2 ORG x 3 HARI x 4 FREK]	24.0 OH	296,000	7,104,000		
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - KPKNL Pekalongan, KPKNL Tegal dan KPKNL Purwokerto [2 ORG x 2 HARI x 4 FREK]	16.0 OH	600,000	9,600,000		
	- Biaya Transport - KPKNL Pekalongan, KPKNL Tegal dan KPKNL Purwokerto [2 ORG x 4 FREK]	8.0 OK	200,000	1,600,000		
	> KPKNL Yogyakarta			11,584,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - KPKNL Yogyakarta [2 ORG x 3 HARI x 2 FREK]	12.0 OH	336,000	4,032,000		
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - KPKNL Yogyakarta [2 ORG x 2 HARI x 2 FREK]	8.0 OH	844,000	6,752,000		
	- Biaya Transport - KPKNL Yogyakarta [2 ORG x 2 FREK]	4.0 OK	200,000	800,000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.026-Semarang I)			1,080,000		PNP
	> KPKNL Semarang			240,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [1 ORG x 2 FREK]	2.0 OH	120,000	240,000		
	> Pejabat Lelang Kelas II			840,000		
	- Uang Transport Dalam Kota [2 ORG x 3 FREK]	6.0 OH	100,000	600,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [1 ORG x 2 FREK]	2.0 OH	120,000	240,000		
4798	Pengelolaan Aset			577,291,000		
4798.AAH	Peraturan lainnya[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	20.0		50,124,000		
	Lokasi : KOTA SEMARANG					

20.0 peraturan,
Rancangan
Peraturan, Surat
Keputusan

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4798.AAH.001 005 A 524111 524113 524111 524113 4798.FAC	Peraturan lainnya[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	20.0 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan			
	Lokasi : KOTA SEMARANG				
	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	20.0 Surat Keputusan		50,124,000	
	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			50,124,000	U
	<i>Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup Kanwil</i>			22,224,000	
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			21,504,000	RM
	(KPPN.026-Semarang I)				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [2 ORG x 2 HARI x 6 FREK]	24.0 OH	296,000	7,104,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [2 ORG x 1 HARI x 6 FREK]	12.0 OH	700,000	8,400,000	
	- Biaya Transport [2 ORG x 6 FREK]	12.0 OK	500,000	6,000,000	
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			720,000	A RM
	(KPPN.026-Semarang I)				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [2 ORG x 1 HARI x 3 FREK]	6.0 OH	120,000	720,000	*
	<i>Survey Lapangan dan Penilaian</i>			27,900,000	
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			25,740,000	RM
(KPPN.026-Semarang I)					
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 2 HARI x 5 FREK]	30.0 OH	296,000	8,880,000		
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [3 ORG x 1 HARI x 5 FREK]	15.0 OH	700,000	10,500,000		
- Biaya Transport [3 ORG x 5 FREK]	15.0 OK	424,000	6,360,000		
<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			2,160,000	A RM	
(KPPN.026-Semarang I)					
- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [2 ORG x 1 HARI x 9 KALI]	18.0 OH	120,000	2,160,000	*	
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	98.0 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja		144,307,000		
Lokasi : KOTA SEMARANG					
4798.FAC.004	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	97.0 Orang		120,345,000	
100	Tidak Ada Komponen			120,345,000	U
<i>Pembinaan dan Peningkatan Profesi Lelang</i>			58,665,000		
<u>Belanja Bahan</u>			11,005,000	A PNP	
(KPPN.026-Semarang I)					
- Biaya Percetakan Backdrop, Banner dan Plakat	1.0 KEG	10,180,000	10,180,000	*	
- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [15 ORG x 1 FREK]	15.0 OK	39,000	585,000	*	
- Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [15 ORG x 1 FREK]	15.0 OK	16,000	240,000	*	
<u>Belanja Jasa Profesi</u>			4,700,000	A PNP	
(KPPN.026-Semarang I)					
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	*	
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 3 JAM x 1 KEG]	3.0 OJ	900,000	2,700,000	*	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.026-Semarang I)			42,000,000	A	PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [4 ORG x 3 HARI x 5 FREK]	60.0 OH	296,000	17,760,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [4 ORG x 2 HARI x 5 FREK]	40.0 OH	486,000	19,440,000	*	
	- Biaya Transport [4 ORG x 5 FREK]	20.0 OK	240,000	4,800,000	*	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.026-Semarang I)			960,000	A	PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [4 ORG x 1 HARI x 2 FREK]	8.0 OH	120,000	960,000	*	
B	<u>Pemeriksaan Pejabat Lelang</u>			61,680,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.026-Semarang I)			10,320,000	A	PNP
	- Biaya Percetakan Backdrop, Banner dan Plakat	1.0 KEG	9,220,000	9,220,000	*	
	- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [20 ORG x 1 FREK]	20.0 OK	39,000	780,000	*	
	- Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [20 ORG x 1 FREK]	20.0 OK	16,000	320,000	*	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.026-Semarang I)			50,400,000	A	PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [4 ORG x 3 HARI x 6 FREK]	72.0 OH	296,000	21,312,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [4 ORG x 2 HARI x 6 FREK]	48.0 OH	486,000	23,328,000	*	
	- Biaya Transport [4 ORG x 6 FREK]	24.0 OK	240,000	5,760,000	*	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.026-Semarang I)			960,000	A	PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [4 ORG x 1 HARI x 2 FREK]	8.0 OH	120,000	960,000	*	
4798.FAC.005	Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	1.0 Orang		23,962,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			23,962,000	U	
A	<i>Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah</i>			23,962,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.026-Semarang I)			4,938,000		RM
	- Biaya Percetakan Backdrop, Banner dan Plakat [1 KEG]	1.0 KEG	1,038,000	1,038,000		
	- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [30 ORG x 1 FREK x 2 HARI]	60.0 OK	50,000	3,000,000		
	- Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [30 ORG x 1 FREK x 2 HARI]	60.0 OK	15,000	900,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.026-Semarang I)			18,664,000	A	RM
	> Survei Luar Kota			18,664,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [2 ORG x 3 HARI x 4 FREK]	24.0 OH	296,000	7,104,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [2 ORG x 2 HARI x 4 FREK]	16.0 OH	600,000	9,600,000	*	
	- Biaya Transport [2 ORG x 4 FREK]	8.0 OK	245,000	1,960,000	*	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.026-Semarang I)			360,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [1 ORG x 3 HARI x 1 FREK]	3.0 OH	120,000	360,000	*	
4798.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	8.0 Laporan, Rekomendasi		135,000,000		
	Lokasi : KOTA SEMARANG					
4798.FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	3.0 Rekomendasi		31,632,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			31,632,000	U	
<i>A</i>	<i>Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN Kewenangan Kanwil</i>			<i>29,472,000</i>		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.026-Semarang I)			27,072,000	A	RM
	> Pemantauan atas Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN			20,304,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - Pemantauan atas Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN [2 ORG x 2 HARI x 6 FREK]	24.0 OH	296,000	7,104,000		
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - Pemantauan atas Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN [2 ORG x 1 HARI x 6 FREK]	12.0 OH	700,000	8,400,000	*	
	- Biaya Transport - Pemantauan atas Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN [2 ORG x 6 FREK]	12.0 OK	400,000	4,800,000		
	> Investigasi atas Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN			6,768,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - Investigasi atas Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN [3 ORG x 3 HARI x 1 FREK]	9.0 OH	296,000	2,664,000		
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - Investigasi atas Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN [2 ORG x 1 HARI x 2 FREK]	4.0 OH	626,000	2,504,000		
	- Biaya Transport - Investigasi atas Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN [2 ORG x 2 FREK]	4.0 OK	400,000	1,600,000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.026-Semarang I)			2,400,000		RM
	> Pemantauan atas Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN			1,920,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam - Pemantauan atas Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN [2 ORG x 1 HARI x 8 FREK]	16.0 OH	120,000	1,920,000		
	> Investigasi atas Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN			480,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam - Investigasi atas Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN [2 ORG x 1 HARI x 2 FREK]	4.0 OH	120,000	480,000		
<i>B</i>	<i>Pelaksanaan Asset Liabilities Committee (ALCo) Regional Jawa Tengah dan DI Yogyakarta</i>			<i>2,160,000</i>		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.026-Semarang I)			2,160,000		RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam - ALCo [3 ORG x 1 HARI x 6 FREK]	18.0 OH	120,000	2,160,000		
4798.FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	2.0 Rekomendasi		34,176,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			34,176,000	U	
<i>A</i>	<i>Penyusunan Basis Data dan Informasi Penilaian</i>			<i>17,088,000</i>		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
 UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
 ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.026-Semarang I)			12,048,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas [2 ORG x 3 HARI x 2 FREK]	12.0 OH	296,000	3,552,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [2 ORG x 2 HARI x 2 FREK]	8.0 OH	600,000	4,800,000		
	- Transportasi [2 ORG x 4 FREK]	8.0 OK	462,000	3,696,000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.026-Semarang I)			5,040,000		RM
	> Survei Basis Data			5,040,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [2 ORG x 21 FREK x 1 HARI]	42.0 OH	120,000	5,040,000		
B	Penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB)			17,088,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.026-Semarang I)			17,088,000		RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 3 HARI x 3 FREK]	27.0 OH	296,000	7,992,000		
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [3 ORG x 2 HARI x 2 FREK]	12.0 OH	600,000	7,200,000		
	- Biaya Transport [2 ORG]	4.0 OK	474,000	1,896,000		
4798.FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	3.0 Rekomendasi		69,192,000		
100	Tidak Ada Komponen			69,192,000	U	
A	Penggalian Potensi Lelang kepada Stakeholder			69,192,000		
521211	Belanja Bahan (KPPN.026-Semarang I)			22,932,000	A	PNP
	- Biaya Percetakan Backdrop, Banner dan Plakat	2.0 KEG	9,186,000	18,372,000	*	
	- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [30 ORG x 2 FREK]	60.0 OK	60,000	3,600,000		
	- Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [30 ORG x 2 FREK]	60.0 OK	16,000	960,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.026-Semarang I)			44,100,000	A	PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 3 HARI x 7 FREK]	63.0 OH	296,000	18,648,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [3 ORG x 2 HARI x 7 FREK]	42.0 OH	486,000	20,412,000	*	
	- Biaya Transport [3 ORG x 7 FREK]	21.0 OK	240,000	5,040,000	*	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.026-Semarang I)			2,160,000	A	PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [3 ORG x 1 HARI x 6 FREK]	18.0 OH	120,000	2,160,000	*	
4798.FAK	Pengelolaan Aset BUN[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	11.0 Unit, Aset		247,860,000		
	Lokasi : KOTA SEMARANG					
4798.FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	11.0 Aset		247,860,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			247,860,000	U	
A	Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain			247,860,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.026-Semarang I)			9,780,000	RM
	> Aset Eks BPPN/PPA/BDL			2,150,000	
	- Makan Rapat Biasa - Aset Eks BPPN/PPA/BDL [10 ORG x 1 FREK]	10.0 OK	50,000	500,000	
	- Snack Rapat Biasa - Aset Eks BPPN/PPA/BDL [10 ORG x 1 FREK]	10.0 OK	15,000	150,000	
	- Biaya Percetakan Backdrop, Banner dan Plakat - Aset Eks BPPN/PPA/BDL	1.0 THN	1,500,000	1,500,000	
	> ABMA/T			7,630,000	
	- Makan Rapat Biasa - ABMA/T [45 ORG x 1 BLN x 2 FREK]	90.0 OK	50,000	4,500,000	
	- Snack Rapat Biasa - ABMA/T [45 ORG x 1 BLN x 2 FREK]	90.0 OK	15,000	1,350,000	
	- Biaya Percetakan Backdrop, Banner dan Plakat - ABMA/T	1.0 THN	1,780,000	1,780,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.026-Semarang I)			139,800,000	RM
	> Tim Asistensi Daerah Penyelesaian ABMA/T			139,800,000	
	- Honorarium Wakil Ketua TAD (ditetapkan dengan Kepmen) [3 ORG x 11 BLN]	33.0 OB	850,000	28,050,000	
	- Honorarium Sekretaris TAD (ditetapkan dengan Kepmen) [1 ORG x 9 BLN]	9.0 OB	750,000	6,750,000	
	- Honorarium Anggota TAD (Non Kemenkeu) [14 ORG x 10 BLN]	140.0 OB	750,000	105,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.026-Semarang I)			3,600,000	RM
	> Aset Eks BPPN/PPA/BDL			3,600,000	
	- Uang Balas Jasa Waker [1 ASET x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.026-Semarang I)			7,200,000	RM
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 2 FREK]	8.0 OJ	900,000	7,200,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.026-Semarang I)			85,920,000	RM
	> Aset Eks BPPN/PPA/BDL			16,128,000	
	>> Pengamanan Aset Eks BPPN/PPA/BDL		0	16,128,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas - Pengamanan Aset Eks BPPN/PPA/BDL [2 ORG x 3 HARI x 3 FREK]	18.0 OH	296,000	5,328,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - Pengamanan Aset Eks BPPN/PPA/BDL [2 ORG x 2 HARI x 3 FREK]	12.0 OH	700,000	8,400,000	
	- Transportasi - Pengamanan Aset Eks BPPN/PPA/BDL [2 ORG x 3 FREK]	6.0 OK	400,000	2,400,000	
	> ABMA/T			69,792,000	
	>> Melakukan Inventarisasi ABMA/T dengan cara Penelitian Fisik (Tim Asistensi Daerah)		0	69,792,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas - ABMA/T [3 ORG x 3 HARI x 8 FREK]	72.0 OH	296,000	21,312,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ABMA/T [3 ORG x 2 HARI x 8 FREK]	48.0 OH	700,000	33,600,000	
	- Transportasi - ABMA/T [3 ORG x 8 FREK]	24.0 OK	620,000	14,880,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.026-Semarang I) > Aset Eks BPPN/PPA/BDL >> Pengamanan Aset Eks BPPN/PPA/BDL - Uang Transport Dalam Kota - Pengamanan Aset Eks BPPN/PPA/BDL [1 ORG x 1 HARI x 13 FREK]			1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000	
4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif			13,752,000	
4801.ACE	Perizinan Profesi[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	8.0 Orang		13,752,000	

	Lokasi : KOTA SEMARANG				
4801.ACE.001	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	8.0 Orang		13,752,000	
100	Tidak Ada Komponen			13,752,000	U
A	Pemberian Rekomendasi/Perizinan Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II			13,752,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.026-Semarang I) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 2 HARI x 1 LOK x 2 FREK - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [3 ORG x 1 HARI x 1 LOK x 2 FREK - Biaya Transport [3 ORG x 1 LOK x 2 FREK]	12.0 OH 6.0 OH 6.0 OK	296,000 700,000 400,000	3,552,000 4,200,000 2,400,000	A * * *
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.026-Semarang I) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [3 ORG x 1 HARI x 10 FREK]	30.0 OH	120,000	3,600,000	A *
015.09.WA	Program Dukungan Manajemen			4,205,618,000	
4700	Legislasi dan Litigasi			27,780,000	
4700.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	4.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		27,780,000	

	Lokasi : KOTA SEMARANG				
4700.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	4.0 Layanan		27,780,000	
100	Tidak Ada Komponen			27,780,000	U
A	Pelaksanaan Advokasi Hukum			27,780,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.026-Semarang I) > Advokasi Hukum - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - Advokasi Hukum [1 ORG x 2 HARI x 15 FREK] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - Advokasi Hukum [1 ORG x 1 HARI x 13 FREK] - Biaya Transport - Advokasi Hukum [1 ORG x 20 FREK]	30.0 OH 13.0 OH 20.0 OK	296,000 620,000 332,000	23,580,000 8,880,000 8,060,000 6,640,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.026-Semarang I) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [1 ORG x 1 HARI x 35 KALI]	35.0 OH	120,000	4,200,000	RM
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			4,061,253,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
 UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
 ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4701.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	24.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		1,817,363,000	

4701.EBA.002	Lokasi : KOTA SEMARANG Kerumahtanggaan	12.0 Layanan		233,882,000	
100	Tidak Ada Komponen			233,882,000	U
A	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan			233,882,000	
521211	Belanja Bahan			6,400,000	RM
	(KPPN.026-Semarang I)				
	- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [80 Orang x 1 Keg]	80.0 OK	65,000	5,200,000	
	- Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [80 Orang x 1 KEG]	80.0 OK	15,000	1,200,000	SBM
522151	Belanja Jasa Profesi			5,600,000	RM
	(KPPN.026-Semarang I)				
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 1 FREK]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	
	- Honorarium Kerohaniawan [1 ORG x 1 JAM x 5 FREK]	5.0 OK	400,000	2,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.026-Semarang I)			218,882,000	A	RM
	> Pembinaan Kerumahtanggaan			23,304,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 2 HARI x 4 FREK]	24.0 OH	296,000	7,104,000		
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [3 ORG x 1 HARI x 4 FREK]	12.0 OH	800,000	9,600,000		
	- Biaya Transport [3 ORG x 4 FREK]	12.0 OK	550,000	6,600,000		
	> Kegiatan Pimpinan			133,450,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) - Kegiatan Pimpinan [1 ORG x 3 HARI x 25 KALI]	75.0 OH	296,000	22,200,000		
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (JAWA TENGAH) - Kegiatan Pimpinan [1 ORG x 2 HARI x 25 KALI]	50.0 OH	1,800,000	90,000,000	*	
	- Biaya Transport Jawa Tengah - Kegiatan Pimpinan [1 ORG x 25 KALI]	25.0 OK	400,000	10,000,000		
	- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II Jawa Tengah [1 ORG x 3 HARI x 25 KALI]	75.0 OK	150,000	11,250,000	*	
	> Monitoring dan Evaluasi Bagian Umum			48,384,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) - Monitoring dan Evaluasi Bagian Umum [3 ORG x 3 HARI x 6 KALI]	54.0 OH	296,000	15,984,000		
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (JAWA TENGAH) - Monitoring dan Evaluasi Bagian Umum [3 ORG x 2 HARI x 6 KALI]	36.0 OH	700,000	25,200,000		
	- Biaya Transport Jawa Tengah - Monitoring dan Evaluasi Bagian Umum [3 ORG x 6 KALI]	18.0 OK	400,000	7,200,000		
	> Sidang Grading			13,744,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Yogyakarta dan Purwokerto) - Sidang Grading [2 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	8.0 OH	296,000	2,368,000	*	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Surakarta, Tegal dan Pekalongan) - Sidang Grading [2 ORG x 1 HARI x 3 KALI]	6.0 OH	296,000	1,776,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (JAWA TENGAH) - Sidang Grading [2 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	8.0 OH	700,000	5,600,000	*	
	- Biaya Transport Jawa Tengah - Sidang Grading [2 ORG x 5 KALI]	10.0 OK	400,000	4,000,000	*	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			3,000,000		RM
	(KPPN.026-Semarang I)					
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [1 ORG x 1 HARI x 25 KALI]	25.0 OH	120,000	3,000,000		
4701.EBA.994	Layanan Perkantoran	12.0 Layanan		1,583,481,000		
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,583,481,000	U	
A	<i>Pembayaran Biaya Operasional Kantor</i>			<i>864,870,000</i>		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.026-Semarang I)			568,934,000	A	RM
	- PBB Rumah Negara	1.0 THN	4,000,000	4,000,000		
	- Pakaian Dinas Pegawai (Jawa Tengah) [65 PEG x 2 SETEL]	130.0 SETEL	527,000	68,510,000		
	- Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Jawa Tengah) [8 PEG x 2 SETEL]	16.0 SETEL	334,500	5,352,000	*	
	- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Jawa Tengah)	65.0 OT	1,530,000	99,450,000		
	- Honorarium Pengemudi Jawa Tengah [4 ORG x 13 BLN]	52.0 OB	3,455,000	179,660,000		
	- Honorarium Pramubakti Jawa Tengah [3 ORG x 13 BLN]	39.0 OB	3,455,000	134,745,000		
	- Honorarium Pramubakti Jawa Tengah [1 ORG x 3 BLN]	3.0 OB	3,455,000	10,365,000		
	- Jamuan Tamu	1.0 THN	22,500,000	22,500,000	*	
	- Snack Corner	12.0 BLN	3,200,000	38,400,000		
	- Uang Lembur Pramubakti, dan Pengemudi [16 PEG x 12 BLN x 1 FREK x 2 JAM]	384.0 OJ	13,000	4,992,000		
	- Uang Makan Lembur Pramubakti, dan Pengemudi [8 PEG x 4 BLN x 1 HARI x 1 FREK]	32.0 OH	30,000	960,000		
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.026-Semarang I)			38,285,000		RM
	- Multivitamin dan bahan lainnya [65 PEG x 8 HARI]	520.0 OH	73,625	38,285,000		
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.026-Semarang I)			8,556,000		RM
	- Pengiriman Surat Dinas	12.0 BLN	713,000	8,556,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.026-Semarang I)			77,280,000	
	> Honorarium Pengguna Anggaran			52,800,000	
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,370,000	16,440,000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,330,000	15,960,000	
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	530,000	6,360,000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	470,000	5,640,000	
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	350,000	8,400,000	
	> Honorarium Pengguna Barang			4,320,000	
	- Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	180,000	4,320,000	
	> Honorarium SAI			12,000,000	
	- Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	
	- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [3 ORG x 12 BLN]	36.0 OB	150,000	5,400,000	
	> Honorarium Pejabat Pengadaan			8,160,000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	680,000	8,160,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.026-Semarang I)			72,522,000	A
	- Alat Tes Urine [130 ORG x 1 KEG]	130.0 OK	50,000	6,500,000	*
	- Biaya Pemeriksaan Kesehatan [65 ORG x 1 KEG]	65.0 OK	480,000	31,200,000	
	- Biaya Pengangkutan BMN dan Arsip [1 KEG x 1 THN]	1.0 OK	6,612,000	6,612,000	
	- Pencetakan dan Penggandaan [1 THN]	1.0 THN	4,200,000	4,200,000	
	- Makan Rapat Biasa [60 ORNG x 6 FREK]	360.0 OK	40,250	14,490,000	
	- Snack Rapat Biasa [119 ORNG x 5 FREK]	595.0 OK	16,000	9,520,000	
521252	<u>Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel</u> (KPPN.026-Semarang I)			21,500,000	
	- Barang Ekstrakomptable	1.0 THN	21,500,000	21,500,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.026-Semarang I)			72,690,000	A
	- ATK dan Komputer Supplies	1.0 THN	72,690,000	72,690,000	*
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.026-Semarang I)			1,403,000	
	- Biaya Telepon [2 Bln]	2.0 Bln	701,500	1,403,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.026-Semarang I)			3,700,000	A	RM
	- Biaya Langganan Air	1.0 THN	3,700,000	3,700,000	*	
B	<u>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>			351,806,000		
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.026-Semarang I)			317,806,000		RM
	- Pemeliharaan AC Split	5.0 UNIT	572,000	2,860,000		
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	65.0 PEG	68,000	4,420,000		
	- Pemeliharaan Instalasi Jaringan	1.0 TAHUN	7,665,000	7,665,000		
	- Pemeliharaan CCTV	1.0 UNIT	3,231,000	3,231,000		
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II (Jawa Tengah)	1.0 UNIT	43,960,000	43,960,000		
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (D.I. Yogyakarta)	6.0 UNIT	38,220,000	229,320,000		
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Tengah)	5.0 UNIT	5,270,000	26,350,000		
523123	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.026-Semarang I)			34,000,000		RM
	- Belanja Persediaan Pemeliharaan	1.0 THN	34,000,000	34,000,000		
C	<u>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u>			213,875,000		
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.026-Semarang I)			106,074,000		RM
	- Pemeliharaan Bangunan Gedung (Halaman Rumah Negara) [2978 M2]	2978.0 M2	9,000	26,802,000		
	- Pemeliharaan Bangunan Gedung (Rumah Negara) [734 M2]	734.0 M2	108,000	79,272,000		
523119	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya</u> (KPPN.026-Semarang I)			107,801,000	A	RM
	- Pemeliharaan Bangunan Gudang Tertutup Permanen	989.0 M2	109,000	107,801,000	*	
F	<u>Sewa Lainnya</u>			107,100,000		
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.026-Semarang I)			107,100,000	A	RM
	- Sewa Mesin Fotokopi Mesin Fotokopi Analog [7 UNIT x 12 BLN]	84.0 UB	1,275,000	107,100,000	*	
TJ	<u>Jasa Pemeliharaan/Annual Technical Support (ATS)</u>			45,830,000		
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.026-Semarang I)			45,830,000	A	RM
	- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	97.0 UNIT	320,000	31,040,000	*	
	- Pemeliharaan Printer	34.0 UNIT	435,000	14,790,000	*	
4701.EBB	<u>Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]</u>	552.0 Unit, m2, Paket		2,243,890,000		
	Lokasi : KOTA SEMARANG					
4701.EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	24.0 Unit		348,000,000		
100	Tidak Ada Komponen			348,000,000	U	
A	TANPA SUB KOMPONEN			348,000,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.026-Semarang I)			348,000,000	A	RM
	- Sice	1.0 Unit	10,824,000	10,824,000		
	- Roll O Pack	1.0 Unit	66,000,000	66,000,000	*	
	- Roll O Pack	1.0 Unit	64,344,000	64,344,000		
	- Locker	15.0 Unit	5,220,000	78,300,000	*	
	- Alat Penghancur Kertas	1.0 Unit	4,000,000	4,000,000	*	
	- Alat Penghancur Kertas	1.0 Unit	4,000,000	4,000,000		
	- Lemari Es	3.0 Unit	3,550,000	10,650,000		
	- Tabung Pemadam Kebakaran	5.0 Unit	3,200,000	16,000,000	*	
	- AC Split 3/4 PK	6.0 UNIT	6,085,000	36,510,000		
	- Kompor Tanam	1.0 UNIT	2,960,000	2,960,000		
	- AC Split 2 PK	1.0 UNIT	9,205,000	9,205,000		
	- Mesin Cuci Front Loading	1.0 UNIT	5,200,000	5,200,000		
	- Kamera Pendukung Rapat	1.0 UNIT	3,999,000	3,999,000		
	- Handhone Layanan	1.0 UNIT	3,000,000	3,000,000		
	- Dispenser	2.0 UNIT	2,750,000	5,500,000		
	- Microwave	1.0 UNIT	1,400,000	1,400,000		
	- Handhone Kehumasan	1.0 UNIT	17,999,000	17,999,000		
	- Grinder Kopi	1.0 UNIT	1,384,000	1,384,000		
	- Microphone Wireless Meja Rapat	1.0 UNIT	5,625,000	5,625,000		
	- Tablet	1.0 UNIT	1,100,000	1,100,000		
4701.EBB.004	Gedung/Bangunan	528.0 m2		1,895,890,000		
100	Tidak Ada Komponen			1,895,890,000	U	
<i>RB</i>	<i>Renovasi Rumah Dinas</i>			<i>1,895,890,000</i>		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
533121	<u>Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.026-Semarang I)			1,895,890,000	A	RM
	> Rehabilitasi 2 unit Rumah Negara Tipe B dan Tipe C di Jalan Rowosari			826,066,000		
	- Pekerjaan Konstruksi	229.6 m2	2,885,000	662,396,000	*	
	- Konsultan Perencana	1.0 PAKET	84,510,000	84,510,000	*	
	- Konsultan Pengawas	1.0 PAKET	54,360,000	54,360,000	*	
	- Biaya Pengelolaan Konstruksi	1.0 PAKET	24,800,000	24,800,000	*	
	> Rehabilitasi 2 unit Rumah Negara Tipe C di Jalan Musi dan Jalan Indragiri			519,550,000		
	- Pekerjaan Konstruksi	170.0 m2	2,369,000	402,730,000	*	
	- Konsultan Perencana	1.0 PAKET	58,770,000	58,770,000	*	
	- Konsultan Pengawas	1.0 PAKET	38,610,000	38,610,000	*	
	- Biaya Pengelolaan Konstruksi	1.0 PAKET	19,440,000	19,440,000	*	
	> Rehabilitasi 1 unit Rumah Negara Tipe B di Jalan Kijang Utara II			550,274,000		
	- Pekerjaan Konstruksi	128.0 m2	3,343,000	427,904,000		
	- Konsultan Perencana	1.0 PAKET	61,290,000	61,290,000		
	- Konsultan Pengawas	1.0 PAKET	40,230,000	40,230,000		
	- Biaya Pengelolaan Konstruksi	1.0 PAKET	20,850,000	20,850,000		
4702	<u>Pengelolaan komunikasi dan informasi publik</u>			67,457,000		
4702.BMB	<u>Komunikasi Publik[Program Baru - Perubahan Kebijakan]</u>	274.0 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume		67,457,000		

4702.BMB.001	<u>Pembinaan/Edukasi Publik</u>	220.0 Orang		32,177,000		
100	<u>Tidak Ada Komponen</u>			32,177,000	U	
A	<u>Edukasi kepada Masyarakat</u>			17,200,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u>			10,000,000		RM
	(KPPN.026-Semarang I)					
	- Biaya Percetakan Backdrop, Banner dan Plakat	2.0 FREK	3,500,000	7,000,000		
	- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [20 ORG x 2 FREK]	40.0 OK	60,000	2,400,000		
	- Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [20 ORG x 2 FREK]	40.0 OK	15,000	600,000		
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			3,600,000	A	RM
	(KPPN.026-Semarang I)					
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 1 KEG]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	*	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			1,800,000		RM
	(KPPN.026-Semarang I)					
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 2 FREK]	4.0 OH	296,000	1,184,000		
	- Biaya Transport [1 ORG x 1 FREK]	1.0 OK	616,000	616,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
ALOKASI Rp. 5,374,721,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.026-Semarang I) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 9 FREK]	18.0 OH	100,000	1,800,000	A	RM
<i>B</i>	<i>Kegiatan HORI</i>			14,977,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.026-Semarang I) - Biaya Percetakan Backdrop, Banner dan Plakat - Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [65 ORG x 1 FREK] - Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [65 ORG x 1 FREK]	1.0 FREK 65.0 OK 65.0 OK	8,902,000 60,000 15,000	8,902,000 3,900,000 975,000	A	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.026-Semarang I) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [5 ORG x 1 HARI x 2 FREK]	10.0 OH	120,000	1,200,000	A	RM
4702.BMB.002	Kehumasan	54.0 kegiatan		35,280,000		
100	Tidak Ada Komponen			35,280,000	U	
<i>A</i>	<i>Peliputan Berita Mengenai Kegiatan DJKN</i>			35,280,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.026-Semarang I) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG x 2 HARI x 10 FREK] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (JAWA TENGAH) [2 ORG x 1 HARI x 10 FREK] - Biaya Transport [2 ORG x 10 FREK]	40.0 OH 20.0 OH 20.0 OK	296,000 700,000 400,000	11,840,000 14,000,000 8,000,000	A	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.026-Semarang I) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [1 ORG x 1 HARI x 12 FREK]	12.0 OH	120,000	1,440,000	A	RM
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal			49,128,000		
4704.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	5.0 Dokumen,	Layanan, Laporan,	49,128,000		
		Rekomendasi				
	Lokasi : KOTA SEMARANG					
4704.EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5.0 Dokumen		49,128,000		
100	Tidak Ada Komponen			49,128,000	U	
<i>A</i>	<i>Implementasi Pengendalian dan Kepatuhan Internal</i>			16,920,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.026-Semarang I) > Monitoring dan Evaluasi ke KPKNL dan Pengendalian Kepatuhan Internal - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [2 ORG x 2 HARI x 5 FREK] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [2 ORG x 1 HARI x 5 FREK] - Biaya Transport [2 ORG x 5 FREK]	20.0 OH 10.0 OH 10.0 OK	296,000 700,000 400,000	5,920,000 7,000,000 4,000,000	A	RM
<i>B</i>	<i>Implementasi Manajemen Risiko</i>			32,208,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
 UNIT KERJA (411821) KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
 ALOKASI Rp. 5,374,721,000

Halaman : 20

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP (6)	
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.026-Semarang I)			32,208,000	A	RM
	> Dialog Kinerja Organisasi dan Pemantauan Risiko			32,208,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [24 ORG x 2 HARI x 1 FREK]	48.0 OH	296,000	14,208,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [12 ORG x 1 HARI x 1 FREK]	12.0 OH	700,000	8,400,000	*	
	- Biaya Transport [24 ORG x 1 FREK]	24.0 OK	400,000	9,600,000	*	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Semarang, 7 Januari 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT LELANG

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 7 UTARA (APT), JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710;
CALL CENTER 150-991; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-687/KN.6/2025

Yth. : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
8. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
9. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi
10. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura
11. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I
12. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja

Dari : Direktur Lelang
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyampaian Piagam Penghargaan dalam Rangka Pemberian Apresiasi Insan Lelang Indonesia
Tanggal : 4 Agustus 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan *Workshop* Lelang dan *Soft Launching* Rumah Lelang Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

- Workshop* Lelang dan *Soft Launching* Rumah Lelang Indonesia telah sukses dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2025 bertempat di Aula Pendopo Parapatan, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.
- Dalam pelaksanaan *Soft Launching* Rumah Lelang Indonesia yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, telah diumumkan para penerima penghargaan "Apresiasi Insan Lelang Indonesia" yaitu para pemangku kepentingan internal dan eksternal DJKN yang telah berkontribusi dalam meraih kinerja lelang terbaik berdasarkan realisasi capaian tahun 2024.
- Adapun untuk Kanwil DJKN dan KPKNL terdapat beberapa peraih penghargaan berdasarkan kategori dan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Kriteria	Penerima Penghargaan
Kanwil DJKN Performa Lelang Terbaik Kategori I	Frekuensi lelang \geq 4.000, Jumlah Pelelang, PNBP, Target PNBP Lelang, Zonasi, Data Antrian Permohonan, dan Frekuensi per Pelelang berdasarkan capaian kinerja lelang tahun 2024	Juara I : Kanwil DJKN Jawa Barat Juara II : Kanwil DJKN Jawa Timur Juara III : Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Kanwil DJKN Performa Lelang Terbaik Kategori II	Frekuensi lelang < 4.000, Jumlah Pelelang, PNBP, Target PNBP Lelang, Zonasi, Data Antrian Permohonan, dan Frekuensi per Pelelang berdasarkan capaian kinerja lelang tahun 2024	Juara I Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Juara II Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau Juara III Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
KPKNL Performa Lelang Terbaik Kategori I	Frekuensi lelang \geq 1.000, Jumlah Pelelang, PNBP, Target PNBP Lelang, Zonasi, Data Antrian Permohonan, dan Frekuensi per Pelelang berdasarkan capaian kinerja lelang tahun 2024	Juara I KPKNL Bandung Juara II KPKNL Bogor Juara III KPKNL Bekasi
KPKNL Performa Lelang Terbaik Kategori II	Frekuensi lelang < 1.000, Jumlah Pelelang, PNBP, Target PNBP Lelang, Zonasi, Data Antrian Permohonan, dan Frekuensi per Pelelang berdasarkan capaian kinerja lelang tahun 2024	Juara I KPKNL Jayapura Juara II KPKNL Jakarta I Juara III KPKNL Singaraja

4. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan *soft copy* piagam dimaksud untuk para penerima penghargaan.

Direktorat lelang berkomitmen untuk terus adaptif dan kolaboratif dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan dan selalu menjaga integritas dalam memberikan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Lelang



Ditandatangani secara elektronik
Winidraty Ariane Siallagan

Tembusan:

1. Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta
2. Kepala kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku
3. Para Kepala Subdirektorat pada Direktorat Lelang

